



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**“KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN CORPORATE GOVERNANCE
SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA BANK YANG
LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA”**

SKRIPSI



**ALFAN JAMIN PANEY
06 153 062**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**



No. Alumni Universitas	ALFAN JAMIN PANEY	No. Alumni Fakultas
------------------------	-------------------	---------------------

BIODATA

a). Tempat/TglLahir : Bandung / 17 Januari 1989 b). Nama OrangTua : Alexander Paney dan Fandit Ambar Irianingsih c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 06153062 f). Tanggal lulus : 2 Januari 2012 g). Predikat lulus :Sangat Memuaskan h). IPK : 3,07 i). Lama Studi : 5 Tahun 4 Bulan j). Alamat Orang Tua : Jl. Raya Muaralabuh No. 19

KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN CORPORATE GOVERNANCE SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA BANK YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA

Skripsi S-1 Oleh : Alfan Jamin Paney, Pembimbing : Prof. DR. Niki Lukviarman, SE, MBA, Ak

ABSTRACT

Bank has some special characteristics that differs it from other firm especially in practice of corporate governance. In this highly regulated industry, the rules about corporate governance practices has become strictly applied in order to minimize agency problem and increase control and monitoring by stakeholders through Board of Director of the company. The purpose of this research is to investigate and analyze the influence of Board of Director's (BOD) performance (or Board of Commissioner's (BOC) in Indonesian model), and corporate governance (CG) practices to bank's financial performance in Indonesia. BOC performance measured by the frequency of board meeting, board composition, board remuneration, and board training. This research conducted on banks which are listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) during 2007-2010. The result of this research indicates that BOC performance and corporate governance practices had a significant influence to bank performance.

Keywords: Agency problem, Corporate governance, Board of Commissioner, Bank performance

Abstrak telah disetujui oleh Pembimbing.

Tanda Tangan	
Nama Terang	Prof. DR. Niki Lukviarman, SE, MBA, Ak

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Januari 2011. Abstrak telah disetujui oleh Penguji :

Tanda Tangan	
Nama Terang	DR. H. Yuskar, SE, MA, Ak

Mengetahui:

Ketua Jurusan:

Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

		Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas	:	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	:	Nama	Tanda Tangan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi 'Alamiin.. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya yang selalu tercurah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN CORPORATE GOVERNANCE SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA BANK YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Andalas Padang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Fandit Ambar Irianingsih dan Alexander Paney
Setiap doa yang diberikan menjadi pelindung dan pengantar dalam setiap keberhasilan. Kini kupersembahkan satu karya yang kudapatkan dari kerja keras, perjuangan dan kegigihan yang selalu diajarkan kepadaku.
2. Kedua adik tersayang, Nurul Hidayah dan Meiza Fadilah atas dukungan tanpa henti selama proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Niki Lukviarman, SE, MBA, Ak sebagai dosen pembimbing skripsi sekaligus motivator utama dibalik penyelesaian skripsi ini. Tanpa bantuan, nasehat, serta arahan dari beliau, mungkin skripsi ini akan selesai

satu tahun mendatang atau berakhir jadi bungkus gorengan ☺, terima kasih banyak Pak!

4. Bapak Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah memberi kesempatan penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas sekaligus dosen penelaah pada seminar skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar, Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Staf biro akuntansi, Da Ari, Ni Ifa, dan Mama Lolli yang senantiasa dengan senang hati membantu urusan akademik dan birokrasi di Jurusan Akuntansi.
8. Rekan-rekan akuntansi angkatan 2006 serta sahabat di dalam dan di luar kampus.
9. 'Teh melati' yang memberikan inspirasi pada suatu sore di tepi lapangan bola.
10. Saphira (195 km/h), Sophia (149 km/h), dan Maya (90 km/h) for every twist of the throttle.
11. Para peneliti terdahulu, untuk artikel, jurnal, dan buku yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Penulis telah berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik mungkin, namun penulis sadar bahwa manusia tidak lepas dari kesalahan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, 25 April 2012



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 <i>Agency Theory</i> dan <i>Stewardship Theory</i>	10
2.1.2 <i>Corporate Governance</i>	14
2.1.3 <i>Corporate Governance</i> Pada Bank	18
2.1.4 Dewan Komisaris.....	22
2.2 <i>Corporate Performance</i>	25

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu	27
2.4 Perumusan Hipotesa.....	30
2.4.1 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Kinerja.....	30
2.4.2 Komposisi Dewan Komisaris Terhadap Kinerja	30
2.4.3 Pelatihan Anggota Dewan Komisaris Terhadap Kinerja	31
2.4.4 Remunerasi Dewan Komisaris Terhadap Kinerja.....	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel	33
3.2 Data dan Pengumpulan Data	33
3.3 Kerangka Teoritis Penelitian	34
3.4 Operasionalisasi Variabel	34
3.4.1 Variabel Independen	35
3.4.2 Variabel Dependen.....	38
3.5 Model Penelitian	38
3.6 Metode Analisis Data.....	39
3.6.1 Uji Asumsi Klasik.....	39
3.6.1.1 Uji Normalitas.....	40
3.6.1.2 Uji Multikolinearitas	40
3.6.1.3 Uji Heterokedastisitas	41
3.6.1.4 Uji Autokorelasi.....	41
3.7 Pengujian Hipotesis	42
3.7.1 Uji Serentak (Uji F)	42
3.7.2 Uji Koefisien Determinasi	42

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	44
4.2 Analisis Data	47
4.2.1 Statistik Deskriptif	47
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	49
4.2.2.1 Hasil Uji Normalitas	49
4.2.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas	52
4.2.2.3 Hasil Uji Heterokedastisitas	53
4.2.2.4 Hasil Uji Autokorelasi	55
4.2.3 Hasil Pengujian Hipotesis	55
4.2.3.1 Pengaruh Kinerja Dewan Komisaris dan <i>Corporate Governance</i> terhadap EPS	55
4.2.3.2 Pengaruh Kinerja Dewan Komisaris dan <i>Corporate Governance</i> terhadap NIM	58
4.2.3.3 Hasil Uji F (F test)	60
4.2.3.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi	62
4.2.3.5 Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis	63
4.3 Interpretasi Hasil	64
4.3.1 Pengaruh Frekuensi rapat Dewan Komisaris Terhadap Kinerja	64
4.3.2 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Terhadap Kinerja ..	65
4.3.3 Pengaruh Pelatihan Anggota Dewan Komisaris Terhadap Kinerja	65
4.3.4 Pengaruh Remunerasi Dewan Komisaris Terhadap Kinerja	66
4.3.5 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris, dan Remunerasi Dean Komisaris Secara	

Bersama-sama Terhadap Kinerja..... 67

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 69

5.2 Batasan Penelitian 73

5.3 Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

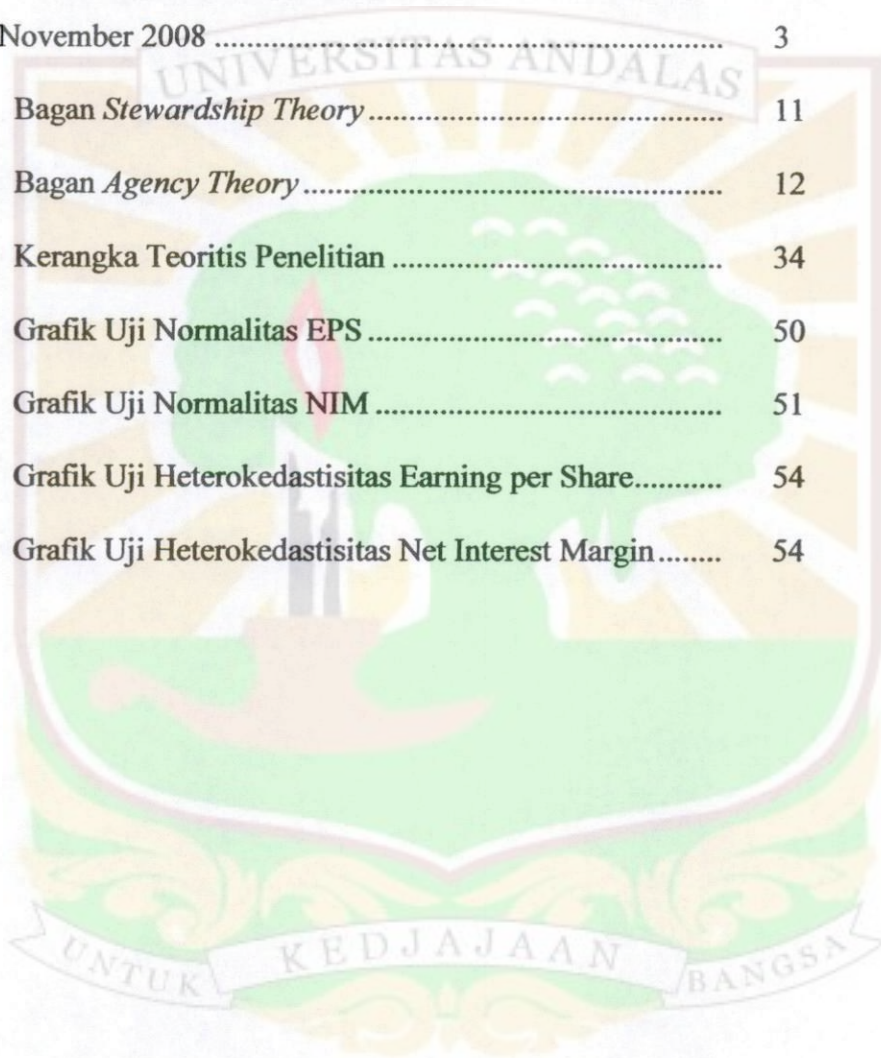
	Hal
Tabel 1.1 Indeks Saham Beberapa Bursa di Dunia, Juni-November 2008	2
Tabel 1.2 Kinerja Bursa Utama Dunia Tahun 2008-2010	4
Tabel 3.1 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	35
Tabel 3.2 Jumlah Anggota Dewan Komisaris	36
Tabel 3.3 Pelatihan Anggota Dewan Komisaris	37
Tabel 3.4 Tingka Remunerasi Dewan Komisaris	38
Tabel 3.5 Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson	42
Tabel 4.1 Daftar Bank Yang Menjadi Sampel	45
Tabel 4.2 Keterangan Penolakan Sampel	46
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif	47
Tabel 4.4 Binomial Test Variabel : <i>Board Training</i>	47
Tabel 4.5 Uji Normalitas EPS Kolmogorov-Smirnov	51
Tabel 4.6 Uji Normalitas NIM Kolmogorov-Smirnov	52
Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas Seluruh Variabel Independen	53
Tabel 4.8 Uji Autokorelasi	55
Tabel 4.9 Uji Regresi EPS	56
Tabel 4.10 Uji Regresi NIM	58
Tabel 4.11 Hasil Uji F EPS	61
Tabel 4.12 Hasil Uji F NIM	61

	Hal
Tabel 4.13 Koefisien Determinasi EPS	62
Tabel 4.14 Koefisien Determinasi NIM	62
Tabel 4.15 Hasil Uji Hipotesis.....	63



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Pergerakan Nilai Tukar Rupiah November 2007 – November 2008	3
Gambar 2.1 Bagan <i>Stewardship Theory</i>	11
Gambar 2.2 Bagan <i>Agency Theory</i>	12
Gambar 3.1 Kerangka Teoritis Penelitian	34
Gambar 4.1 Grafik Uji Normalitas EPS	50
Gambar 4.2 Grafik Uji Normalitas NIM	51
Gambar 4.3 Grafik Uji Heterokedastisitas Earning per Share.....	54
Gambar 4.4 Grafik Uji Heterokedastisitas Net Interest Margin.....	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Output SPSS dengan Alat Ukur Kinerja EPS

Lampiran 2 Output SPSS dengan Alat Ukur Kinerja NIM

Lampiran 3 Tabel Data Perusahaan Sampel



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008 ternyata berdampak global. Krisis pada awalnya bermula dari pertumbuhan *subprime mortgage* ketika The Fed (Bank Sentral Amerika) menurunkan suku bunga sebesar 1%-1,75% sekitar tahun 2001-2004. Pada saat itu sektor properti mengalami pertumbuhan pesat dan hal inilah yang membuat sekuritas yang terkait dengan bisnis ini melambung tinggi nilainya. Pada tahun 2007, The Fed mulai menaikkan suku bunganya hingga level 5,25% yang ternyata berdampak buruk karena mengakibatkan banyak nasabah yang gagal bayar.

Sekuritas yang terkait dengan *subprime mortgage* nilainya anjlok, sehingga para investor menjual portofolionya untuk menutup kerugian. Kejatuhan lembaga keuangan sebesar Lehman Brothers menunjukkan betapa seriusnya krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu. Kasus kredit macet tersebut tiba-tiba berkembang menjadi krisis keuangan global dan hanya dalam hitungan bulan telah berubah menjadi krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia., tak terkecuali Indonesia.

Trauma akibat krisis moneter pada tahun 1998 kembali membayangi perekonomian nasional. Kekhawatiran ini cukup beralasan karena perdagangan saham Indonesia pada akhir Oktober 2008 telah berkontraksi hingga 42% dibandingkan bulan Agustus 2008 (sebelum krisis meledak), dan merupakan salah satu negara dengan kontraksi perdagangan saham terburuk di dunia.

Dampak krisis global tersebut tidak hanya terjadi pada sektor keuangan, tetapi juga telah merambah ke sektor riil. Kerugian dan kebangkrutan baik di industri keuangan maupun manufaktur terus terjadi, yang disusul dengan gelombang pemutusan hubungan kerja di seluruh dunia. Amerika Serikat (AS), Inggris, Jepang dan sejumlah negara lainnya sudah dinyatakan dalam fase resesi (Bank Indonesia, 2009).

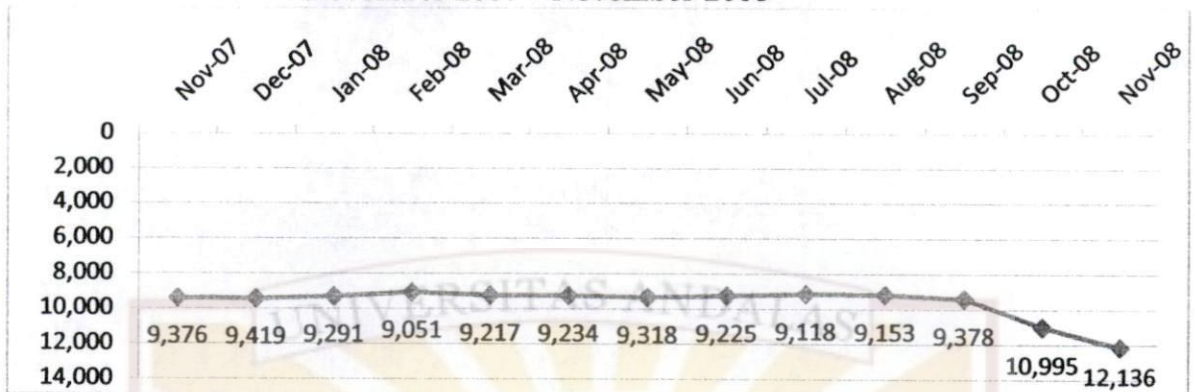
Tabel 1.1
Indeks Saham Beberapa Bursa di Dunia, Juni-November 2008

INDEKS SAHAM	Jun-08	Jul-08	Aug-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	Pergerakan	
							Aug-Oct 08	Aug-Nov 08
Hikkei	13,481.4	13,376.3	13,072.4	11,368.3	8,577.0	8,512.3	-	-
							34.4%	34.9%
Hang Seng	22,102.0	22,731.1	21,261.9	18,016.2	13,968.7	13,888.2	-	-
							34.3%	34.7%
KLSE	1,186.6	1,163.1	1,100.5	1,018.7	863.6	866.1	-	-
							21.5%	21.3%
SET	768.6	676.3	684.4	594.5	416.5	401.8	-	-
							39.1%	41.3%
STI	2,947.5	2,292.7	2,739.9	2,358.9	1,794.2	1,732.6	-	-
							34.5%	36.8%
IHSG	2,349.1	2,304.5	2,165.9	1,846.1	1,256.7	1,241.5	-	-
							42.0%	42.7%
DJIA*	11,346.5	11,583.7	11,543.4	10,850.6	9,180.7	8,829.0	-	-
							20.5%	23.5%
FTSE*	5,529.9	5,420.7	5,636.6	4,902.5	4,291.7	4,288.0	-	-
							23.9%	23.9%

Sumber: Bussiness Indonesia dalam Economic Review No. 219, Maret 2010

Selain itu nilai tukar rupiah telah terdepresiasi 20,1% terhadap posisi sebelum krisis. Dimana kondisi ini berlanjut hingga November 2008 dimana perdagangan saham Indonesia berkontraksi 42,7% dan rupiah terdepresiasi hingga 32,6% terhadap posisi Agustus 2008.

Gambar 1.1
Pergerakan Nilai Tukar Rupiah
November 2007 – November 2008



Kembali *corporate governance* menjadi isu utama dalam situasi krisis saat ini. Kegagalan dan kelemahan dalam penerapan *corporate governance* termasuk manajemen penaksiran resiko dan gaji eksekutif, berakibat pada krisis financial yang terjadi (OECD, 2009). Struktur dan implementasi *corporate governance* yang baik sangat dibutuhkan untuk bertahan dari kondisi krisis tersebut.

Konsep *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks, 2003). Ada beberapa hal yang ditekankan antara lain, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (YPPMI & SC, 2002). Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *corporate governance* (Kaen, 2003; Shaw, 2003) yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan *corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa

kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Evaluasi terhadap mekanisme *corporate governance* terus dilakukan pada masa krisis dan masa pemulihan pasca-krisis. Hasilnya beberapa bursa saham di dunia menunjukkan perbaikan kinerja selama dua tahun terakhir. Hal ini menjadi indikator bahwa mekanisme pelaksanaan *corporate governance* berimbas kepada kinerja perusahaan.

Tabel 1.2
Kinerja Bursa Utama Dunia
Tahun 2008-2010

Bursa Dunia	23/5/2008	29/12/2009	30/12/2010
Cina (Shanghai Composite)	4.173,41	3.211,76	2.853,52
Singapura (Strait Times)	3.559,01	2.869,76	3.207,91
Jakarta Composite	2.104,24	2.518,58	3.703,51
Australia (All-Ords)	4.671,90	4.856,70	4.325,80
Dow Jones	10.001,35	10.555,92	10.193,39
Bangkok SET	715,68	742,14	1.034,59
S&P 500	10.354,67	11.708,05	11.521,35
Nasdaq	2.215,87	2.258,50	2.229,04
London (FTSE-100)	4.876,89	5.431,50	5.063,93
Hongkong (Hang Seng)	20.789,97	21.499,44	22.969,30

Sumber : www.seputarforex.com/berita/indeks_saham_dunia

Sistem *corporate governance* yang dianut Indonesia mengikuti pola *Continental European System*, dengan ciri-ciri sebagai berikut; (1) dianutnya sistem dan perangkat hukum yang bersumber pada tradisi *French-Civil Law*, (2) digunakannya struktur dua struktur dewan perusahaan (*two tier board system*), (3) terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan (*concentrated ownership structure*), (4) dominannya sumber pembiayaan perusahaan dari luar perusahaan berupa hutang (*external financing*) (Lukviarman, 2004).

Perusahaan di Indonesia menggunakan *two-tier board system* dimana terdapat sistem dewan dua tingkat, yaitu dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan Komisaris (*Board of Commisioner*) bertindak sebagai pengawas dan

penasehat dalam perusahaan, sedangkan dewan direksi (*Board of Director*) termasuk manajemen di dalamnya menjalankan fungsi eksekutif dalam perusahaan.

Praktek-praktek *corporate governance* di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Bapepam. Khusus untuk perbankan, peraturan mengenai praktek-praktek *corporate governance* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Setelah krisis moneter yang terjadi pada 1997 silam, *corporate governance* menjadi sebuah *imperative* baru bagi setiap perusahaan di Indonesia khususnya perusahaan-perusahaan besar dan BUMN, tetapi tetap saja terjadi berbagai skandal seperti yang terjadi pada BNI 46 yang melibatkan pejabat di BNI dengan pejabat bisnis perusahaan ekspor hingga mencapai lebih dari 1,7 triliun. Tidak hanya Bank BNI 46 yang kebobolan melainkan juga Bank Mandiri harus menanggung kerugian karena juga kebobolan beberapa triliun rupiah. Hal ini disebabkan ada peminjam yang sebetulnya tidak *bankable* tetapi dipaksakan mendapat kucuran pinjaman (Lestariningsih, 2008).

Pada industri perbankan yang notabene *highly regulated* masih saja terjadi berbagai skandal dan pembobolan yang kebanyakan dilakukan oleh pihak internal bank. Disinilah fungsi pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan manajemen perusahaan menjadi sangat penting. Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/PBI/2006 Pasal 9 ayat 2 dijelaskan bahwa Dewan Komisaris wajib

melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pemilihan sektor perbankan sebagai objek penelitian beralasan sebagaimana dinyatakan Eliyanora (2008), perbankan di suatu negara sangat vital, dimana apabila sistem perbankan ini tidak berfungsi maka bukan industri perbankan itu saja yang *collapse* tetapi juga akan memberikan *multiplier effect* yang sangat negatif terhadap kinerja sistem-sistem ekonomi yang lain, misalnya pertumbuhan sektor riil, tingkat pengangguran yang tinggi, dan rendahnya pertumbuhan ekonomi. Sehingga bank sebagai lembaga intermediasi mempunyai ciri khusus dibandingkan dengan sektor usaha lain karena selain menghadapi berbagai macam resiko, kegagalan perbankan dapat mempengaruhi sektor ekonomi lainnya baik secara makro maupun mikro.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melihat pengaruh kinerja dewan komisaris dan *corporate governance* terhadap kinerja bank yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010. Periode penelitian selama empat tahun dari 2007-2010 tujuannya agar penelitian ini dapat dilakukan secara lebih mendalam. Dengan demikian, pengambilan periode penelitian diatas cukup memadai untuk melihat pengaruh kinerja dewan komisaris dan *corporate governance* terhadap kinerja yang diukur dengan NIM dan EPS.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang akan menjadi pokok pembahasan secara lebih spesifik dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kinerja dewan komisaris dan *corporate governance* berpengaruh terhadap *net interest margin (NIM)*?
2. Apakah kinerja dewan komisaris dan *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan yang di proxy kan dengan *Earning Per Share (EPS)*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kinerja dewan komisaris dan *corporate governance* terhadap *Net Interest Margin* pada Bank yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kinerja dewan komisaris dan *corporate governance* terhadap *Earning Per Share* pada Bank yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya:

1. Bagi penulis, adalah untuk menambah wawasan mengenai *board governance*, khususnya *corporate governance structure* pada sektor perbankan, juga sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau sebagai pedoman bagi perusahaan untuk mengetahui aspek-aspek yang mempengaruhi kinerja.

3. Bagi pihak regulator dan pihak berkepentingan lainnya. Dengan mengetahui pengaruh antara penerapan *corporate governance* terhadap kinerja, maka diharapkan pihak regulator dapat mengambil kesimpulan apakah peraturan-peraturan *corporate governance* yang telah ada benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan atau tidak. Pihak regulator dapat mengambil kebijakan lebih lanjut dengan membuat peraturan-peraturan yang mendukung terciptanya perekonomian yang lebih baik.
4. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan kepustakaan/referensi empiris mengenai pengaruh pelaksanaan *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan terutama sektor perbankan di Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas hanya pada pengaruh kinerja dewan komisaris dan *corporate governance* terhadap kinerja pada bank yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah perluasan dan kerancuan pembahasan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan uraian landasan teori yang mendasari *corporate governance* dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan, kajian penelitian-penelitian sebelumnya dan pengembangan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian serta analisis data dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

BAB V Penutup

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

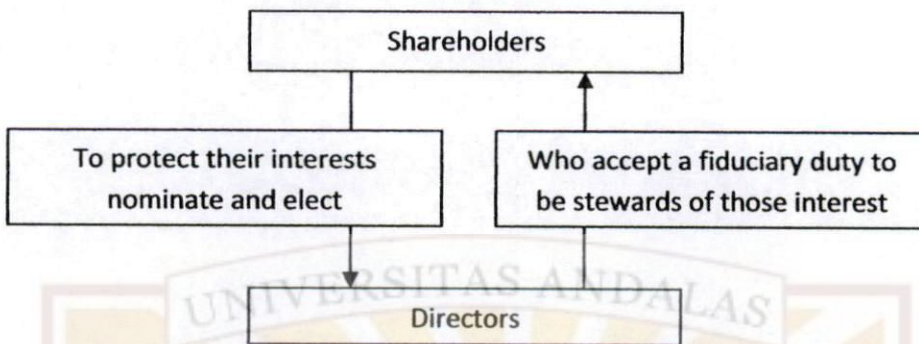
2.1 Landasan Teori

Bagian ini membahas tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Terdiri atas *agency theory* dan *stewardship theory*, *corporate governance*, dan *corporate performance*.

2.1.1 *Agency theory* dan *stewardship theory*

Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory* (Chinn,2000; Shaw,2003) dalam (Kaihatu, 2006 p.2). *Stewardship theory* mencerminkan ide klasik dari *corporate governance*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*.

Gambar 2.1
Bagan Stewardship Theory



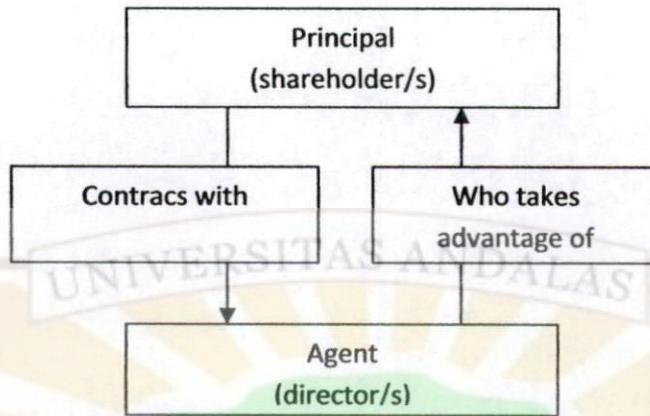
Sumber: Tricker, 2009, p.224

Agency theory melihat dari sudut pandang yang berbeda dengan *stewardship theory*. Jensen dan Meckling (1976) dalam (Bob Tricker, 2009) menjelaskan:

"Agency theory involves a contract under which one or more persons (the shareholders) engage another person (the directors) to perform some service on their behalf which includes delegating some decision making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers there is good reason to believe the agent will not always act in the best interest of the principal".

Inti dari *agency theory* adalah dimana *shareholders (principal)* mendelegasikan kewenangannya dalam mengelola perusahaan kepada manajemen (*agent*). Masalah muncul karena *agent* tersebut bertindak untuk kepentingan diri sendiri bukan sebagai orang yang arif dan bijaksana dan bertindak adil untuk kepentingan *shareholders*.

Gambar 2.2
Bagan Agency Theory



Sumber: Tricker, 2009, p.219

Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Kaihatu, 2006).

Menurut Eisenhardt (1989), *agency theory* dilandasi oleh tiga asumsi yaitu:

a. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*).

b. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information (AI)* antara *principal* dan *agent*.

c. Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Selanjutnya Eisenhardt (1989) menjelaskan bahwa *agency theory* memperhatikan penyelesaian *agency problem* yaitu:

1. Konflik tujuan *principal* dan *agent*
2. Sulit dan mahal untuk *principal* memastikan apa yang sebenarnya dilakukan oleh *agent*.

Agency problem tersebut muncul sebagai akibat *agency relationship*, yaitu:

1. *Principal* tidak dapat memastikan *agent* telah bertindak dengan benar. Sehingga *agent* mungkin saja tidak bertindak berdasarkan kontrak. Hal ini akan menimbulkan permasalahan:
 - a. *Moral Hazard* yaitu ketika sedikit usaha dari *agent*. Dimana *agent* tidak melakukan usaha sebagaimana telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
 - b. *Adverse selection* mengarah pada *misrepresentation* kemampuan *agent*. *Agent* mungkin mengaku memiliki *skill* dan kemampuan tertentu, namun masalahnya *principal* tidak dapat mengetahui kebenaran *skill* dan kemampuan tersebut karena keterbatasan informasi.
2. Permasalahan *risk sharing* yang muncul akibat *principal* dan *agent* memiliki sikap atau pandangan yang berbeda terhadap resiko. Sehingga *principal* dan *agent* akan memilih tindakan berbeda akibat

preferensi resiko yang berbeda. *Agent* biasanya *risk averse* karena tidak dapat mendiversifikasi resiko kehilangan pekerjaannya. Sedangkan *principal* biasanya *risk neutral* karena biasanya mereka telah mendiversifikasi resiko investasi mereka.

2.1.2 *Corporate governance*

Dalam sebuah perusahaan dengan bentuk perseroan terbatas, terdapat jarak antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Jarak inilah yang kemudian menimbulkan keraguan apakah dana yang telah diinvestasikan oleh *principal* digunakan secara bijak oleh *agent* sesuai dengan kontrak untuk mendapat return dari investasi tersebut. Hal inilah yang kemudian memicu timbulnya *agency cost* yang harus ditanggung *principal*.

Corporate governance sangat berkaitan dengan bagaimana membuat para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan modal yang telah ditanamkan oleh investor. Selain itu *corporate governance* juga berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997).

Tricker (2009) menyebutkan dua perspektif mengenai *corporate governance*. Yang pertama, *corporate governance* adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan dikelola, dan yang kedua, *corporate governance* adalah tentang menjalankan kekuasaan atas perusahaan.

Sir Adrian Cadbury (2000), dalam *Studi Penerapan Prinsip-Prinsip Organization for Economic Corporation and Development [OECD] 2004 dalam*

Peraturan Bapepam Mengenai Corporate Governance (2006, p.6), menjelaskan *corporate governance* sebagai berikut:

“Corporate governance is concerned with holding the balance between economic and social goals and between individual and communal goals. The corporate governance framework is there to encourage the efficient use of resources and equally to require accountability for the stewardship of those resources. The aim is to align as nearly as possible the interest of individuals, corporations, and society”.

Definisi diatas menekankan bahwa *corporate governance* adalah keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial, serta keseimbangan antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Kerangka kerja *corporate governance* dibuat untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan akuntabilitas atas penggunaan sumber daya tersebut. Tujuannya untuk mencapai tujuan pribadi, perusahaan, dan masyarakat.

Pada 2001 OECD memperluas definisi *corporate governance* sebagai berikut:

“Corporate governance refers to the private and public institution, including laws, regulations, and public institutions, which together govern the relationship, in a market economy, between corporate managers and entrepreneurs, on the one hand, and those who invest resources in corporations on the other”.

Pada definisi ini OECD menjelaskan bahwa *corporate governance* mengacu pada institusi baik milik pribadi maupun publik termasuk hukum dan peraturan yang bersama-sama menata hubungan antara manajer perusahaan dan pengusaha di satu sisi dan investor di sisi lain dalam sebuah pasar ekonomi.

Sementara itu Monks dan Minow (2001) memberikan definisi mereka sebagai berikut:

“Corporate governance is the relationship among various participants in determining the direction and performance of corporations. The primary participants are the shareholders, the managements, and the board of directors”.

Secara sederhana Monks dan Minow mengungkapkan bahwa *corporate governance* merupakan hubungan antara berbagai partisipan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan, dimana partisipan utamanya adalah pemegang saham, pihak manajemen, dan direksi.

Dari beberapa definisi *corporate governance* di atas maka *corporate governance* dapat diartikan sebagai hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan terutama investor dan manajemen yang dikelola sedemikian rupa dalam menjalankan bisnis perusahaan untuk menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi semua pihak.

Istilah *corporate governance* didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*-nya (Vishny 1988) dalam (Moore dan Porter, 2007). Cadbury report (1992) mengeluarkan definisi tersendiri tentang *good corporate governance*. Menurut Cadbury, *good corporate governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan

tertentu. Tim GCG BPKP mendefinisikan *good corporate governance* sebagai komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis yang sehat dan beretika.

Center for European Policy Studies (CEPS), memiliki definisi tentang *good corporate governance*. Menurut CEPS, *good corporate governance* merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Sebagai catatan, hak di sini adalah hak seluruh *stakeholders*, bukan terbatas kepada *shareholders* saja. Hak adalah berbagai kekuatan yang dimiliki *stakeholders* secara individual untuk mempengaruhi manajemen. Proses, maksudnya adalah mekanisme dari hak-hak tersebut. Adapun pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan *stakeholders* menerima informasi yang diperlukan seputar aneka kegiatan perusahaan.

Pada April 1998, (OECD) telah mengeluarkan seperangkat prinsip *corporate governance* yang dikembangkan seuniversal mungkin. Hal ini mengingat bahwa prinsip ini disusun untuk digunakan sebagai referensi di berbagai negara yang mempunyai karakteristik sistem hukum, budaya, dan lingkungan yang berbeda. Dengan demikian, prinsip yang universal tersebut akan dapat dijadikan pedoman oleh semua negara atau perusahaan namun disesuaikan dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara masing-masing bilamana diperlukan.

Prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikembangkan OECD meliputi 5 hal sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.

2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham.
3. Peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan.
4. Keterbukaan dan Transparansi.
5. Akuntabilitas dewan komisaris (*board of directors*).

2.1.3 Corporate Governance Pada Bank

Corporate governance pada bank lebih kompleks dan berbeda dari jenis perusahaan lain sehingga membutuhkan lebih banyak perhatian. Dalam Spong dan Sullivan (2007) dinyatakan kerangka *corporate governance* pada bank selain terdiri atas pemegang saham, manajer, dan dewan direksi juga dibawah oleh sistem pengawasan publik dan kebijakan pemerintah yang membuat *corporate governance* pada bank unik dari bentuk perusahaan lain. Bank harus memuaskan keinginan para pemegang saham disisi lain juga harus sesuai dengan tujuan publik.

Corporate governance pada bank memiliki perbedaan dari kebanyakan perusahaan lain. Perusahaan pada umumnya dikelola berdasarkan *Anglo American model*, sedangkan bank lebih cocok menggunakan *Franco German paradigm* (Macey dan O'Hara, 2003). Pada *Anglo American model* yang menjadi fokus utama *corporate governance* hanya untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Sedangkan *Franco German* beranggapan perusahaan sebaiknya membentuk sebuah *industrial partnership* mementingkan *stakeholder* lainnya setidaknya setara dengan pemegang saham. Bank memiliki tanggung jawab di luar pemegang saham, seperti kreditor, manager, karyawan, komunitas local tempat bank beroperasi, suppliers, nasabah, dan regulator yang mengatur deposito dan

pinjaman, sehingga bank harus memperhatikan kepentingan seluruh pihak tersebut setidaknya setara dengan pemegang saham (Macey dan O'Hara, 2003).

Pemerintah sangat peduli terhadap masalah *corporate governance* pada sektor perbankan dibandingkan sektor lain. Terdapat beberapa alasan yang mendasari. Menurut King and Levine (1993) di dalam Tandelilin, Kaaro, dan Mahadwarta (2007) hal ini disebabkan :

1. Bank depositor (terutama depositor dalam jumlah besar) tidak dapat secara efektif melindungi diri mereka sendiri karena mereka tidak dibekali informasi, dan bukan pada posisi dimana mereka dapat mengkoordinasi masing-masing individu depositor.
2. Aset bank biasanya transparan begitu pula dengan likuiditas bank.
3. Ketidakstabilan bank akan membawa ke dampak yang berkelanjutan, yang akan mempengaruhi bank lain, bahkan sistem finansial dan ekonomi.
4. Bank memiliki posisi yang dominan dalam mengembangkan sistem finansial ekonomi dan merupakan mesin yang penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Macey dan O'Hara (2003) menyatakan, bank memiliki masalah *corporate governance* spesial yang membedakannya dengan sektor bisnis lain, yaitu :

- 1) Likuiditas perputaran produksi bank.

Likuiditas bank unik karena dua hal. Pertama, struktur modal pada bank memiliki lebih sedikit ekuitas relatif dibanding sektor bisnis lain. Hal ini tidak normal jika pada sektor bisnis lain, *manufacturing* misalnya, mendanai perusahaan lebih banyak bersumber dari hutang

daripada modal pemilik. Sedangkan pada bank 90% pendanaannya berasal dari deposito yang ditanam nasabah dimana ini merupakan hutang bagi bank. Sehingga dapat disimpulkan 90% pendanaan bank berasal dari hutang. Kedua, bank berinvestasi pada aset jangka panjang atau *illiquid*. Sedangkan tabungan nasabah yang merupakan hutang bagi bank merupakan hutang jangka pendek atau *liquid*. Hal inilah yang membedakan fungsi likuiditas bank dari perusahaan lain. Bank memegang aset *illiquid* namun memiliki hutang *liquid*. Sehingga jika seluruh nasabah menarik tabungannya bersamaan, tidak tersedia dana yang cukup bagi bank untuk membayar seluruhnya. Karena itu pada bank dikenal dana asuransi deposito.

2) Adanya dana asuransi deposito.

Berbeda dengan jenis perusahaan lain, bank mengasuransikan hutangnya yaitu berupa asuransi deposito nasabah. Tujuannya untuk mencegah kegagalan satu bank mempengaruhi ekonomi yang lebih luas. Namun hal ini mempengaruhi insentif pemegang saham dan manager untuk mengambil resiko lebih tinggi. Masalah moral hazard ini timbul karena dua hal. Pertama, pemegang saham dapat memindahkan kerugiannya kepada pihak ketiga yang memberikan asuransi deposito nasabah. Pihak ketiga tersebutlah yang bertanggung jawab atas kegagalan bank. Kedua, masalah moral hazard timbul karena premium dari asuransi deposito tidak sepenuhnya memberikan kompensasi yang layak kepada pihak ketiga yang menanggung asuransi. Sehingga pemegang saham memiliki insentif untuk

meningkatkan resiko, karena jika terjadi kerugian, pemegang saham dapat mengalokasikan kerugian tersebut kepada pihak ketiga, sementara itu jika deposito beresiko tinggi tersebut berhasil, tetap pemegang saham yang mendapatkan keuntungan lebih dari tindakan pengambilan resiko tinggi tersebut.

3) Konflik antara *debtholder* dan pemegang saham.

Setiap jenis industri memiliki konflik kepentingan antara *debtholder* dan pemegang saham. Pengambilan resiko yang tinggi yang didanai oleh pinjaman pihak luar akan menguntungkan pemegang saham. Karena jika terjadi kerugian, pemberi pinjaman yang akan menanggung tidak kembalinya pinjaman yang diberikan. Namun jika investasi ber laba, *debtholder* hanya mendapatkan kompensasi berupa bunga sesuai yang dijanjikan, namun pemegang saham mendapatkan seluruh sisa laba setelah dibayarkan kepada *debtholder*. Pada bank, nasabah yang menabung di bank merupakan *debtholder*. Setiap strategi meningkatkan resiko akan merugikan nasabah bank dan menguntungkan pemegang saham.

4) Struktur asset dan masalah loyalitas.

Dengan adanya pihak ketiga pemberi asuransi deposito, hal ini mengurangi monitoring oleh pemegang saham dan depositor. Karena selain tidak efisien bagi pemegang saham dan depositor untuk memonitor seluruh pegawai secara individual, pihak ketiga pemberi asuransi telah memonitor manajemen menjamin tidak ada *risk taking* yang merugikan depositor dan *fraud* yang dilakukan oleh manajemen.

Pihak ketiga pemberi asuransi deposito tersebut telah menggantikan depositor yang tadinya sebagai kreditor, kini pemberi asuransi deposito yang berperan sebagai kreditor, karena kegagalan pembayaran hutang menjadi tanggung jawab pemberi asuransi. Pemberi asuransi deposito juga merupakan monitor yang baik untuk mencegah fraud, karena bank diharuskan memberi laporan secara berkala kepada pihak asuransi. Bank yang dirasakan tidak aman dapat dikoreksi dan diberi suntikan dana oleh pihak asuransi, ataupun dapat memindahkan manajer jika terbukti melanggar aturan demi kepentingan individunya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada sektor perbankan publik sebagai kreditor digantikan oleh pihak ketiga.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan *corporate governance* pada bank menimbulkan masalah unik dan berbeda kepada manager dan regulator nya, termasuk *cash flow* perusahaan yang berpengaruh bagi investor dan depositor.

2.1.4 Dewan Komisaris

Dewan komisaris pada Bank berbentuk perseroan terbatas menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dimana dijelaskan bahwa komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

Selanjutnya menurut Peraturan bank Indonesia Nomor 8/14/2007, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan

keluarga dengan anggota dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan harus berfungsi dan bertanggungjawab secara kolektif untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Dewan Direksi dan memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan praktek-praktek *corporate governance*. Namun demikian, Dewan Komisaris dilarang berpartisipasi dalam membuat setiap keputusan yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Setiap anggota Dewan Komisaris, termasuk Ketua, memiliki posisi yang sama. Tugas Ketua Dewan Komisaris sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Agar Dewan Komisaris dapat secara efektif melaksanakan tugasnya, prinsip-prinsip berikut harus diperhatikan:

1. Komposisi Dewan Komisaris harus secara efektif membuat keputusan yang tepat dan tepat waktu serta bertindak secara independen;
2. Aktivitas anggota Dewan Komisaris harus profesional dalam arti memiliki integritas dan kemampuan yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan fungsi Dewan Komisaris termasuk untuk memastikan bahwa Direksi memperhatikan kepentingan semua stakeholder;
3. Pengawasan dan fungsi penasehat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, dan pemecatan.

Code of Corporate Governance Indonesia (2006), menjelaskan komposisi, pengangkatan, dan pemberhentian Komisaris sebagai berikut:

1. Komposisi Dewan Komisaris harus dari ukuran yang cukup yang sesuai dengan kompleksitas usaha perusahaan dengan memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan;
2. Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, yang dikenal sebagai Komisaris Independen, dan Komisaris berafiliasi. Terafiliasi berarti memiliki hubungan bisnis dan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan anggota lain dari Dewan Komisaris, dan dengan perusahaan itu sendiri. Anggota afiliasi mantan Direksi dan Dewan Komisaris dan karyawan perusahaan untuk jangka waktu tertentu, dianggap sebagai terafiliasi;
3. Jumlah Komisaris Independen harus diatur sedemikian rupa, untuk memastikan bahwa mekanisme kontrol berjalan efektif dan sesuai dengan hukum dan regulasi. Salah satu Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan;
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham melalui proses yang transparan. Untuk perusahaan yang terdaftar, perusahaan milik negara, provinsi dan daerah milik perusahaan, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat, dan perusahaan dengan pengaruh yang luas pada lingkungan, proses evaluasi calon anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Penunjukan komisaris independen harus telah mempertimbangkan pendapat pemegang

saham minoritas yang diperoleh melalui Komite Nominasi dan Remunerasi;

5. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk alasan yang masuk akal dan setelah anggota terkait dari Dewan Komisaris telah diberi kesempatan untuk membela dirinya sendiri.

2.2 *Corporate Performance*

Performance atau kinerja dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (1995) diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja, kinerja yaitu berkemampuan dengan menggunakan tenaga. Pratolo (2007) menyebutkan *performance* atau kinerja merupakan suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diukur dengan mendasarkan pada suatu perbandingan dengan berbagai standar. Kinerja adalah pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional perusahaan. Efektivitas apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau suatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu penilaian kinerja juga bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar memberikan hasil dan tindakan yang diinginkan.

Net interest margin (NIM) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya

dalam rangka menghasilkan pendapatan bunga bersih. Semakin besar rasio ini maka semakin meningkatnya pendapatan bunga yang diperoleh dari aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank tersebut berada dalam kondisi bermasalah semakin kecil. NIM dapat dirumuskan sebagai berikut (SE BI No. 6/23 DPNP Tanggal 31 Mei 2004)

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata aktiva produktif}}$$

Dalam penelitian ini, selain menggunakan pengukuran akuntansi peneliti juga menggunakan pengukuran kinerja pasar untuk karena angka akuntansi bisa menjadi bias dalam pengukuran kinerja (Bauer et. al. 2003). Oleh karena itu, selain pengukuran kinerja melalui NIM diatas peneliti menambahkan dengan *Earning Per Share*. Rasio ini digunakan untuk mengukur suatu tingkat keuntungan dari perusahaan. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai pada kuartal yang sama pada tahun sebelumnya untuk menggambarkan pertumbuhan tingkat keuntungan perusahaan. Hasil perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk memperkirakan kenaikan ataupun penurunan harga saham suatu perusahaan di bursa saham.

EPS merupakan rasio paling diandalkan oleh investor sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan kepemilikan (Madichah, 2005). Adapun informasi yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan dengan EPS adalah informasi akuntansi keuangan, yaitu laba sebelum pajak dibandingkan dengan jumlah lembar saham. Adapun informasi yang digunakan untuk menghitung EPS adalah informasi akuntansi keuangan, yaitu laba setelah pajak dibandingkan dengan jumlah lembar saham beredar.

$$\text{EPS} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

Berdasarkan pernyataan diatas, penelitian ini akan mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan NIM dan EPS.

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan tentang penerapan *good corporate governance*, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Drobetz *et al.* (2003) melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal Jerman, yang melaksanakan *corporate governance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kinerja saham yang diukur dengan menggunakan *expected stock return*. Perusahaan sampel yang dilibatkan dalam penelitian tersebut sebanyak 91 perusahaan, dengan periode pengamatan selama 50 bulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *expected return*. Selain itu, dalam penelitian ini juga diketahui bahwa *corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *firm value*, *sales growth*, dan PE ratio.

Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Bauer *et al.* (2003) terhadap penerapan GCG di perusahaan-perusahaan Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan GCG terhadap *firm valuation* yang diproxy dengan *Tobins' Q* dan kinerja perusahaan yang diproxy dengan ROE dan NPM. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam FTSE Eurotop 300 selama periode 2000 sampai dengan

2001. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG berpengaruh signifikan terhadap Tobins' Q, ROE dan NPM.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Brown and Caylor (2004) terhadap perusahaan-perusahaan yang listing di New York Stock Exchange dan menerapkan *good corporate governance*. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan (yang diproxy dengan ROE, *Net Profit Margin*, *Sales Growth*, dan *Tobins'Q*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Hasil yang sama diperoleh Cornett (2005) yang melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang termasuk ke dalam kelompok S&P 100. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (yang diproxy dengan ROA).

Penelitian berikutnya yang menggunakan variabel dewan komisaris dilakukan oleh Kiel dan Nicholson (2003) terhadap 348 perusahaan di Australia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sebaran dewan komisaris dan kinerja perusahaan. Hasil penelitian tersebut menyatakan adanya korelasi positif antara ukuran dewan komisaris dengan nilai perusahaan. Penelitian ini juga menunjukkan hubungan positif antara proporsi *inside director* dengan kinerja perusahaan yang diukur berbasis pasar.

Hasil serupa diperoleh Jandik dan Rennie (2005) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan yang

go public di pasar modal yang sedang berkembang (*emerging market*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan yang diproyeksi dengan rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio likuiditas dan rasio leverage. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan.

Temuan berikutnya datang dari Gruszczynski (2006) yang melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan *go public* di Polandia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam perusahaan unggulan menurut *Polish Corporate Governance Forum*. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Klapper dan Love (2002) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan data dari laporan *Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA)* yang berupa pemeringkatan penerapan *corporate governance* untuk 495 perusahaan di 25 negara, dalam penelitian ini kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan Tobin's Q sebagai ukuran penilaian pasar dan *Return On Assets (ROA)* sebagai ukuran kinerja operasional perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang baik akan memperoleh manfaat yang lebih besar di negara-negara yang lingkungan hukumnya buruk.

2.4 Perumusan Hipotesa

2.4.1 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Kinerja

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 dinyatakan bahwa rapat dewan komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. Pada kebanyakan studi, hubungan frekuensi rapat dewan komisaris dengan kinerja perusahaan menunjukkan efek positif. Vafeas (1999) adalah salah satu dari sedikit yang menemukan bahwa frekuensi rapat dewan berbanding terbalik dengan nilai perusahaan.

Meskipun demikian, pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa kasus tersebut adalah karena fakta bahwa dewan komisaris melakukan pertemuan lebih sering pada saat perusahaan sedang menghadapi masa sulit. Secara intuitif, dewan komisaris mengakui signifikansi dan efektivitas pertemuan mereka, sehingga mereka melakukan pertemuan lebih sering dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian, hasil ini masih konsisten dengan prediksi teoritis *corporate governance*.

H_1 : Adanya pengaruh positif frekuensi rapat dewan komisaris terhadap kinerja.

2.4.2 Komposisi Dewan Komisaris Terhadap Kinerja

Sesuai dengan PBI Nomor 8/4/2006 pasal 4 dimana jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah direksi. Larmou dan Vafeas (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ukuran Dewan Komisaris yang lebih besar berpengaruh positif terhadap nilai pemegang saham.

Belkhir (2004) meneliti 174 bank simpan-pinjam selama periode 1995 – 2002 dan menemukan adanya hubungan positif antara ukuran Dewan Komisaris dengan kinerja. Hasil ini membalikan paradigma bahwa semakin sedikit anggota Dewan Komisaris maka akan semakin efektif.

H₂ : Adanya pengaruh positif komposisi dewan komisaris terhadap kinerja.

2.4.3 Pelatihan Anggota Dewan Komisaris Terhadap Kinerja

Saat ini kondisi eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha perbankan sehingga risiko yang dihadapi semakin besar. Oleh karena itu, untuk mendukung pengelolaan risiko bagi kegiatan usaha bank diperlukan syarat minimum dan standarisasi kompetensi serta keahlian bagi pengurus dan pejabat di industri perbankan sesuai dengan kompleksitas usahanya.

Dalam PBI Nomor 7/25/PBI/2005 pasal 2 disebutkan bahwa Komisaris wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Hal ini sejalan dengan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

Nikandrou et. al. (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja perusahaan. Namun, belum diketahui pengaruhnya terhadap lingkungan perbankan di Indonesia.

H₃ : Adanya pengaruh positif pelatihan komisaris terhadap kinerja

2.4.4 Remunerasi Dewan Komisaris Terhadap Kinerja

Dalam PBI Nomor 8/14/PBI/2006 dinyatakan bahwa tingkat remunerasi yang ditetapkan paling kurang wajib memperhatikan :

- kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- prestasi kerja individual;
- kewajaran dengan *peer group*; dan
- pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Bhagat & Black (2000) melaporkan bahwa ada hubungan antara kinerja perusahaan dan remunerasi dewan, bahkan jika mereka mengukur kinerja melalui variabel akuntansi atau *return* saham. Hubungan terkuat adalah terkait dengan kinerja berdasarkan nilai buku, yang merupakan dasar perhitungan remunerasi. Mereka menemukan hubungan negatif antara kompensasi dewan dan kinerja industri.

H₄ : Adanya pengaruh positif tingkat remunerasi dewan komisaris terhadap kinerja

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah bank yang *listing* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2007 sampai dengan 2010. Perusahaan telah menerbitkan laporan publikasi untuk tahun-tahun tersebut dan perusahaan tidak *de-listed* selama periode 2007-2010.

Sampel (*sample*) adalah subkelompok atau sebagian dari populasi (Sekaran, 2006). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria :

1. Bank beroperasi di Indonesia.
2. Listing di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010
3. Menerbitkan laporan keuangan periode 2007 hingga 2010.
4. Melaporkan data yang lengkap sehubungan dengan frekuensi rapat dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, pelatihan anggota dewan komisaris, remunerasi dewan komisaris, dan pengukuran kinerja.

3.2 Data dan Metode Pengumpulan Data

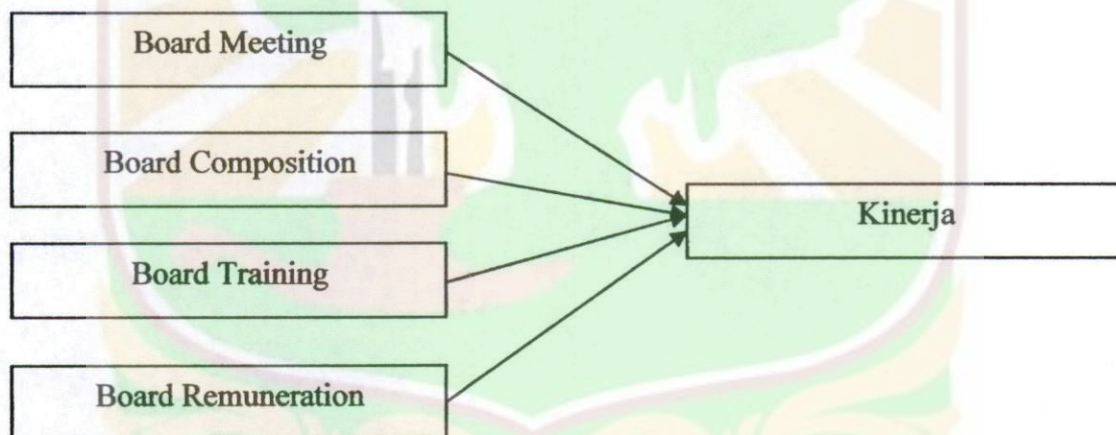
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari *annual report* dan laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari:

- Data total Aktiva dari tahun 2007 - 2010.
- Data total Aktiva produktif dari tahun 2007 – 2010.
- Data total Pendapatan Bunga (*Interest Income*) dari tahun 2007-2010.
- Data Laba/Rugi Setelah Pajak (*Earning After Tax*) dari tahun 2007-2010.
- Data jumlah saham biasa beredar dari 2007 - 2010.

3.3 Kerangka Teoritis Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh kinerja Dewan Komisaris terhadap kinerja perusahaan.

Gambar 3.1
Kerangka Teoritis Penelitian



3.4 Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat).

1. Variabel Independen :
 - a. Frekuensi rapat dewan komisaris
 - b. Komposisi dewan komisaris
 - c. Pelatihan anggota dewan komisaris

d. Remunerasi komisaris

2. Variabel Dependen:

a. *Net Interest Margin/NIM* (untuk model regresi 1).

b. *Earning per share/EPS* (untuk model regresi 2).

3.4.1 Variabel Independen

a. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Adalah jumlah rapat Dewan Komisaris suatu perusahaan dalam rentang waktu satu tahun. Informasi mengenai frekuensi rapat dapat ditemukan dalam *Annual Report* perusahaan. Kriteria pembagian data didasarkan pada *range* antara nilai terkecil dan nilai terbesar untuk frekuensi rapat dewan komisaris pada masing-masing tahun untuk kemudian dibagi menjadi tiga kelompok yaitu *Low*, *Medium*, dan *High*. Hasil pengelompokan data frekuensi rapat dewan komisaris dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	2007	2008	2009	2010
Low	66,66%	66,67%	73,33%	66,67%
Medium	26,67%	13,33%	13,33%	13,33%
High	6,67%	20%	13,33%	20%

Sumber : Data diolah 2011

b. Komposisi Dewan Komisaris

Adalah jumlah anggota Dewan Komisaris dalam sebuah perusahaan, baik Komisaris maupun Komisaris Independen. Dalam Peraturan Bank

Indonesia disebutkan bahwa, jumlah anggota dewan komisaris minimal berjumlah 3 orang dan maksimal sama dengan anggota direksi. Dewan Komisaris pada bank terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen yang paling kurang berjumlah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Kriteria pembagian data didasarkan pada *range* antara nilai terkecil dan nilai terbesar untuk jumlah anggota dewan komisaris pada masing-masing tahun untuk kemudian dibagi menjadi tiga kelompok yaitu *Low*, *Medium*, dan *High*. Hasil pengelompokan data jumlah anggota dewan komisaris dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Jumlah Anggota Dewan Komisaris	2007	2008	2009	2010
Low	26,67%	26,67%	26,67%	33,33%
Medium	33,33%	33,33%	40%	40%
High	40%	40%	33,33%	26,67%

Sumber : Data diolah 2011

c. Pelatihan Anggota Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, setiap Komisaris harus memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diperoleh dari Lembaga Sertifikasi Profesi. Variabel ini menjelaskan apakah Komisaris dalam perusahaan mendapatkan pelatihan selama menjabat sebagai Komisaris perusahaan. Namun tidak semua bank dalam penelitian ini yang secara konsisten menampilkan informasi mengenai pelatihan bagi anggota dewan komisaris dalam laporan tahunannya. Kriteria pembagian data

didasarkan pada *range* antara nilai terkecil dan nilai terbesar untuk pelatihan anggota dewan komisaris pada masing-masing tahun untuk kemudian dibagi menjadi tiga kelompok yaitu *Low*, *Medium*, dan *High*. Hasil pengelompokkan data pelatihan anggota dewan komisaris dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Pelatihan Anggota Dewan Komisaris

Pelatihan Anggota Dewan Komisaris	2007	2008	2009	2010
Ya	40%	66,67%	33,33%	46,67%
Tidak	60%	33,33%	66,67%	53,33%

Sumber : Data diolah 2011

d. Tingkat Remunerasi Dewan Komisaris

Variabel ini merupakan remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dalam satu tahun. PBI mewajibkan seluruh bank untuk mencantumkan informasi mengenai jumlah remunerasi Dewan Komisaris dalam laporan pelaksanaan *corporate governance* sebagaimana diatur oleh PBI. Kriteria pembagian data didasarkan pada *range* antara nilai terkecil dan nilai terbesar untuk tingkat remunerasi dewan komisaris pada masing-masing tahun untuk kemudian dibagi menjadi tiga kelompok yaitu *Low*, *Medium*, dan *High*. Hasil pengelompokkan data tingkat remunerasi dewan komisaris dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Tingkat Remunerasi Dewan Komisaris

Rentang Gaji	2007	2008	2009	2010
Low	40%	66,67%	53,33%	66,67%
Medium	53,33%	20%	33,33%	20%
High	6,67%	13,33%	13,33%	13,33%

Sumber : Data diolah 2011

3.4.2 Variabel Dependen

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kinerja yang dilihat dari *Net Interest Margin* dan *Earning Per Share*.

- a. *Net Interest Margin* dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata aktiva produktif}}$$

- b. *Earning Per Share* dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$EPS = \frac{EAT}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

Keterangan:

EPS = Earning per share

EAT = Laba bersih setelah pajak (Earning after tax)

Jumlah SB = Jumlah Lembar Keseluruhan Saham Biasa

3.5 Model Penelitian

Penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan regresi linear dengan persamaan:

$$NIM = \alpha + \beta_1 (BM) + \beta_2 (BC) + \beta_3 (BT) + \beta_4 (BR) + \varepsilon \dots (1)$$

$$\text{EPS} = \alpha + \beta_1 (\text{BM}) + \beta_2 (\text{BC}) + \beta_3 (\text{BT}) + \beta_4 (\text{BR}) + \varepsilon \dots (2)$$

Keterangan:

NIM	: Net Interest Margin
EPS	: Earning Per Share
BM	: Frekuensi rapat Dewan Komisaris (Board Meeting)
BC	: Komposisi Dewan Komisaris (Board Composition)
BT	: Pelatihan anggota Dewan Komisaris (Board Training)
BR	: Tingkat remunerasi Dewan Komisaris (Board Remuneration)
α	: Konstanta
β	: Koefisien Regresi
ε	: Koefisien Error

Sebelum model regresi 1 dan 2 tersebut digunakan untuk menguji hipotesis terlebih dahulu harus dilakukan uji asumsi klasik.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik dan tidak bias. Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi.

3.6.1.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* adalah (Ghozali, 2009):

1. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.6.1.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian terhadap multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas itu saling berkorelasi. Ada hubungan linear di antara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Jika hal ini terjadi maka sangat sulit untuk menentukan variabel bebas mana yang mempengaruhi variabel terikat.

Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas, dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *varian inflation factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut-off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

3.6.1.3 Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena varian gangguan berbeda antara satu observasi ke observasi yang lain. Uji heterokedastisitas ini dapat dilakukan melalui *scatter plot* variable dependen. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2009) :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

3.6.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (*time series*) atau ruang (*cross sectional*). Hal ini mempunyai arti bahwa suatu tahun tertentu dipengaruhi oleh tahun berikutnya.

Untuk menguji ada tidaknya Autokorelasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan Watson statistik, yaitu dengan melihat koefisien korelasi *Durbin Watson*.

Tabel 3.5
Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson

DW	Kesimpulan
<1,414	Ada autokorelasi positif
1,414 – 1,724	Tanpa kesimpulan
1,724 – 2,276	Tidak ada autokorelasi
2,276 – 2,586	Tanpa kesimpulan
>2,586	Ada autokorelasi negatif

3.7 Pengujian Hipotesis

3.7.1 Uji Serentak (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria berikut:

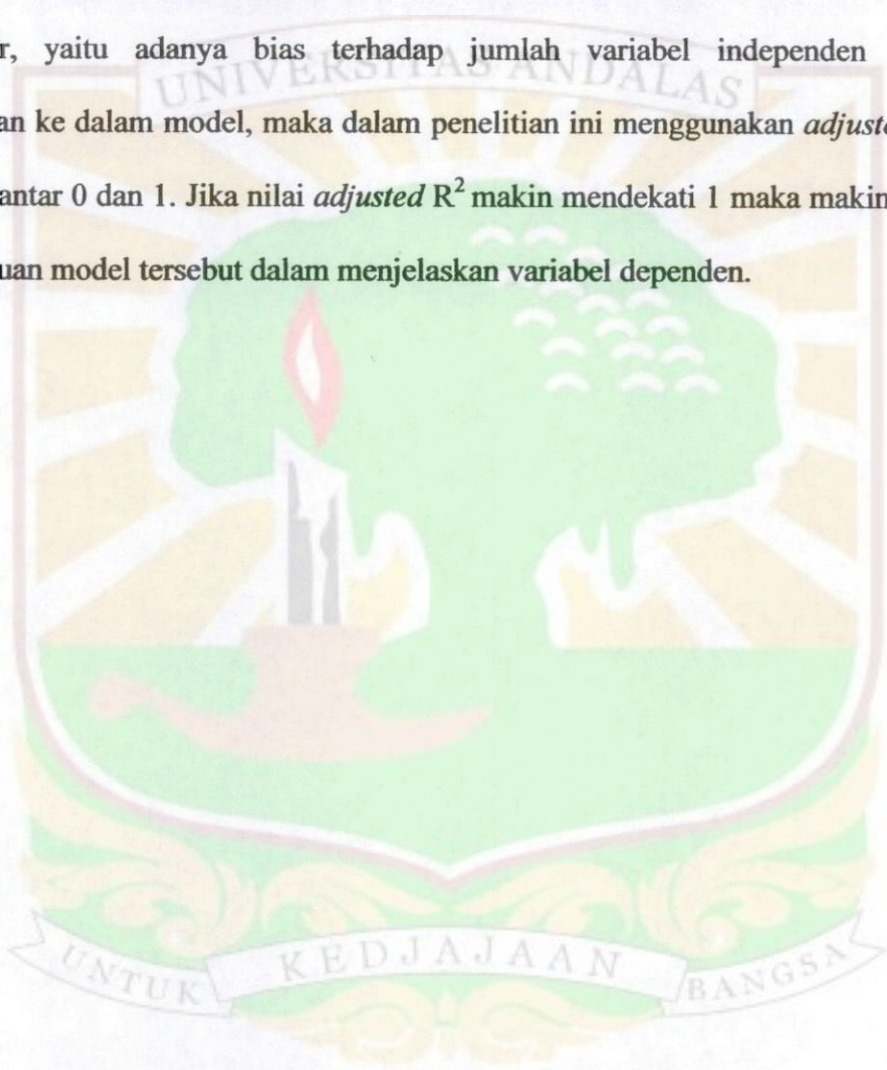
1. Bila nilai signifikansi $f < 0.05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima yang berarti koefisien regresi signifikan, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi $f > 0.05$, maka H_0 diterima atau H_a ditolak yang berarti koefisien regresi tidak signifikan. Hal ini artinya keempat variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.7.2 Uji koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai

yang mendekati satu (1) berarti variabel –variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen, tapi karena R^2 mengandung kelemahan mendasar, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, maka dalam penelitian ini menggunakan *adjusted* R^2 berkisar antar 0 dan 1. Jika nilai *adjusted* R^2 makin mendekati 1 maka makin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen.



BAB IV

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis komposisi Dewan Komisaris, frekuensi rapat Dewan Komisaris, remunerasi Dewan Komisaris dan pelatihan Dewan Komisaris serta pengaruhnya terhadap kinerja pada bank yang listing di Bursa Efek Indonesia.

Seluruh informasi mengenai EPS, NIM, komposisi Dewan Komisaris, frekuensi rapat Dewan Komisaris, remunerasi Dewan Komisaris dan pelatihan Dewan Komisaris diperoleh dari laporan keuangan dan Annual Report masing-masing bank dari tahun 2007 – 2010.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua bank yang listing dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2007 sampai dengan 2010. Perusahaan yang menjadi objek penelitian telah menerbitkan laporan publikasi yang berisi informasi mengenai EPS, NIM, komposisi Dewan Komisaris, frekuensi rapat Dewan Komisaris, remunerasi Dewan Komisaris dan pelatihan Dewan Komisaris untuk tahun-tahun tersebut dan perusahaan tidak *de-listed* selama periode 2007-2010.

Tabel 4.1
Daftar Bank Yang Menjadi Sampel

No.	Kode	Nama Perusahaan
1	INPC	Bank Artha Graha Internasional
2	BNBA	Bank Bumi Arta
3	BABP	Bank ICB Bumiputera
4	BBKP	Bank Bukopin
5	BBCA	Bank Central Asia
6	BNGA	Bank CIMB Niaga
7	BDMN	Bank Danamon
8	BKSW	Bank Kesawan
9	BMRI	Bank Mandiri
10	BBNI	Bank Negara Indonesia
11	NISP	Bank OCBC NISP
12	PNBN	Bank Pan Indonesia
13	BNLI	Bank Permata
14	BBRI	Bank Rakyat Indonesia
15	BVIC	Bank Victoria International

Sumber : Data diolah 2011

Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, 15 dari 29 bank yang listing di Bursa Efek Indonesia dijadikan sampel. Sisa 14 bank tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sampel, dengan keterangan sebagai berikut:



Tabel 4.2
Keterangan Penolakan Sampel

No.	Kode	Nama Perusahaan	Alasan Penolakan Sampel
1	AGRO	Bank Agroniaga	Tidak menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan 2008
2	BACA	Bank Capital Indonesia	Data sehubungan jumlah remunerasi dan frekuensi rapat dewan komisaris tahun 2007 tidak lengkap
3	BAEK	Bank Ekonomi Raharja	Mulai listing tahun 2008
4	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan	Tidak menerbitkan laporan keuangan 2008
5	BBTN	Bank Tabungan Negara	Mulai listing tahun 2009
6	BCIC	Bank Mutiara	Data sehubungan jumlah remunerasi dan frekuensi rapat dewan komisaris tahun 2007 tidak lengkap
7	BEKS	Bank Eksekutif Internasional	Data sehubungan jumlah remunerasi tidak lengkap
8	BNII	Bank Internasional Indonesia	EPS tahun 2007 bernilai negatif
8	BSWD	Bank Swadesi	Tidak menerbitkan laporan tahunan 2007
9	BTPN	Bank Tabungan Pensiunan Nasional	Mulai listing tahun 2008
10	MAYA	Bank Mayapada	Data sehubungan jumlah remunerasi dan frekuensi rapat dewan komisaris tahun 2007 tidak lengkap
11	MCOR	Bank Windu Kentjana International	Data sehubungan jumlah remunerasi dan frekuensi rapat dewan komisaris tahun 2008 tidak lengkap
12	MEGA	Bank Mega	Data sehubungan jumlah remunerasi dan frekuensi rapat dewan komisaris tahun 2008 tidak lengkap
13	SDRA	Bank Himpunan Saudara 1906	Tidak menerbitkan laporan keuangan 2007 dan 2008

Sumber : Data diolah 2011

Keterangan diatas menunjukkan 15 bank dijadikan sampel dalam periode 4 tahun (2007 – 2010), dan 14 bank ditolak menjadi sampel karena tidak memenuhi syarat sampel yang telah dijelaskan diatas, sehingga terdapat 60 observasi dalam penelitian ini.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan suatu gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS 17.0.1 dari variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Board Composition	60	2	9	5.77	1.807
Board Remuneration	60	19.59	24.67	22.4670	1.42040
Board Meeting	60	3	69	17.68	14.656
Board Training	60	0	1	.47	.503
Earning Per Share	60	.38	956.72	150.4492	191.45218
Net Interest Margin	60	1.7700	18.6000	6.067833	2.6863592
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Data diolah 2011

Tabel 4.4
Binomial Test Variabel : Board Training

Binomial Test

	Category	N	Observed Prop.	Test Prop.	Asymp. Sig. (2-tailed)
Board Training	Group 1	1	.28	.50	.699 ^a
	Group 2	0	.32	.53	
	Total		60	1.00	

a. Based on Z Approximation.

Sumber : Data diolah 2011

Hasil statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa jumlah observasi (N) dari penelitian ini ada 60. Dari 60 obeservasi terhadap sampel, nilai variabel *Board Composition* yang terkecil adalah 2 dan yang terbesar yaitu 9. Hal ini berarti jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan yang menjadi sampel paling sedikit berjumlah 2 orang dan paling banyak berjumlah 9 orang. Rata-rata jumlah anggota dewan komisaris perusahaan berjumlah 5,77 orang. Standar deviasi sebesar 1,807 menunjukkan variasi yang terdapat dalam jumlah anggota dewan komisaris.

Pada variabel *Board Remuneration*, semakin besar nilainya, artinya semakin tinggi gaji yang diterima anggota dewan komisaris. Nilai yang ditampilkan merupakan *log natural* dari jumlah remunerasi dewan komisaris dalam satu tahun. Nilai terkecil adalah 19,59 dan yang terbesar adalah 24,67 dengan nilai rata-rata 22,4670. Standar deviasi sebesar 1,42040 menunjukkan variasi yang terdapat dalam jumlah remunerasi yang diterima dewan komisaris.

Pada variabel *Board Meeting*, nilai terkecil adalah 3 dan yang terbesar adalah 69. Hal ini berarti frekuensi rapat dewan komisaris paling sedikit diadakan 3 kali dan paling banyak 69 kali dalam satu tahun. Nilai rata-rata sebesar 17,68 berarti rata-rata dewan komisaris perusahaan sampel mengadakan rapat 17.86 kali dalam satu tahun. Standar deviasi sebesar 14,656 menunjukkan variasi yang terdapat dalam variabel *Board Meeting*.

Pada variabel *Board Training*, nilai terkecil adalah 0 dan terbesar adalah 1 dengan rata-rata sebesar 0,47 dan standar deviasi 0,503. Angka 1 pada variabel menyatakan bahwa perusahaan tersebut melaporkan kegiatan pelatihan bagi

anggota dewan komisaris dalam *annual report*. Sedangkan angka 0 menyatakan bahwa anggota dewan komisaris tidak mengikuti kegiatan pelatihan apapun atau perusahaan tidak mencantumkannya dalam *annual report* mereka. Dalam tabel 4.4 dapat dilihat bahwa terdapat 28 observasi pada perusahaan sampel yang melakukan dan mencantumkan kegiatan pelatihan anggota dewan komisaris pada laporan tahunannya. Sebanyak 32 observasi pada perusahaan sampel tidak melakukan atau mencatatkan kegiatan pelatihan bagi anggota dewan komisaris.

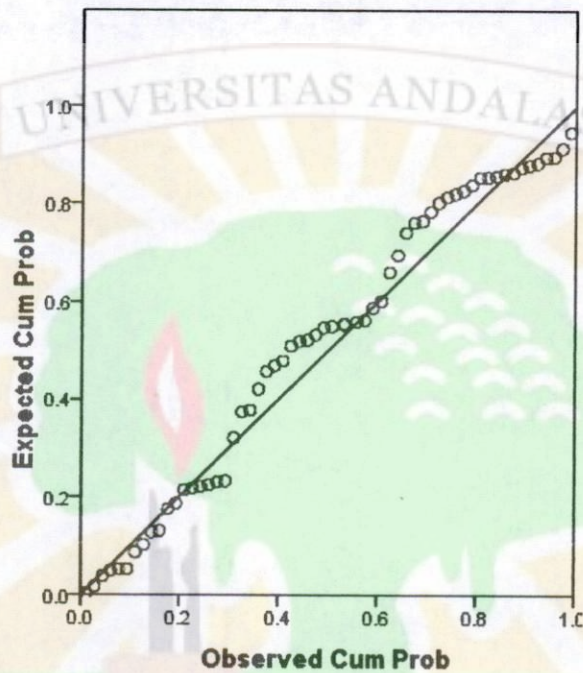
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen dan independen atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva yang berbentuk simetris. Apabila data terdistribusi secara normal, maka data akan menyebar mengikuti garis normal, sebaliknya, jika data tidak terdistribusi normal, maka data akan menyebar mengikuti garis diagonal.

Grafik 4.1
Uji Normalitas EPS

Normal P-P Plot of EPS



Grafik 4.1 diatas menunjukkan pola distribusi data yang normal dimana terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan melihat grafik 4.1 dapat dinyatakan bahwa data EPS memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas yang kedua dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Menurut metode ini, apabila nilai KS sig. ($p > 0,05$) maka variabel tersebut memiliki distribusi normal.

Tabel 4.5
Uji Normalitas EPS Kolmogorov-Smirnov

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
EPS	.095	60	.200*	.953	60	.022

a. Lilliefors Significance Correction

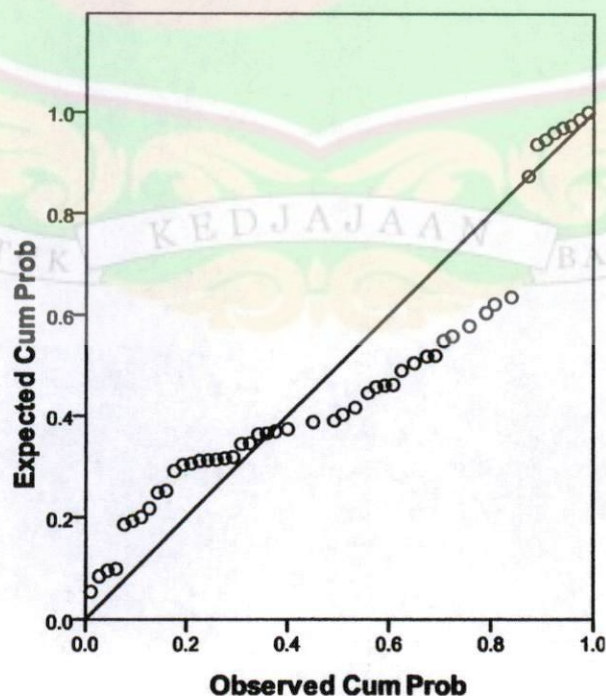
*. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data diolah 2011

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai Sig. variabel EPS sebesar 0.200 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$) maka dapat disimpulkan data berasal dari populasi berdistribusi normal pada taraf signifikansi 0,05.

Grafik 4.2
Uji Normalitas NIM

Normal P-P Plot of Net Interest Margin



Dari grafik 4.2 dapat dilihat bahwa data NIM yang diperoleh tidak mengikuti garis diagonal yang berarti data NIM tersebut tidak memiliki distribusi yang normal.

Karena data NIM tidak memiliki distribusi normal, maka dilakukan analisis non-parametrik untuk uji normalisasi yaitu dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*. Tabel 4.4 berikut menunjukkan uji normalitas untuk variabel NIM:

Tabel 4.6
Uji Normalitas NIM Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Net Interest Margin
N		60
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	6.067833
	Std. Deviation	2.6863592
Most Extreme Differences	Absolute	.231
	Positive	.231
	Negative	-.124
Kolmogorov-Smirnov Z		1.789
Asymp. Sig. (2-tailed)		.003

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data diolah 2011

Dengan melihat tabel 4.4 dapat dinyatakan bahwa data NIM tidak memiliki distribusi normal karena *Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05* ($0,003 < 0,005$).

4.2.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dengan SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan patokan nilai VIF (*variance inflation factor*) dan koefisien korelasi antar variabel bebas. Kriteria yang digunakan adalah: 1) jika nilai VIF kurang dari 10 atau memiliki *tolerance* mendekati 1, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi.

Tabel 4.7
Uji Multikolinieritas Seluruh Variabel Independen

Variabel Dependen	Variabel Independen	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
EPS	Board Composition	.727	1.375
	Board Remuneration	.707	1.415
	Board Meeting	.851	1.175
	Board Training	.895	1.117
NIM	Board Composition	.727	1.375
	Board Remuneration	.707	1.415
	Board Meeting	.851	1.175
	Board Training	.895	1.117

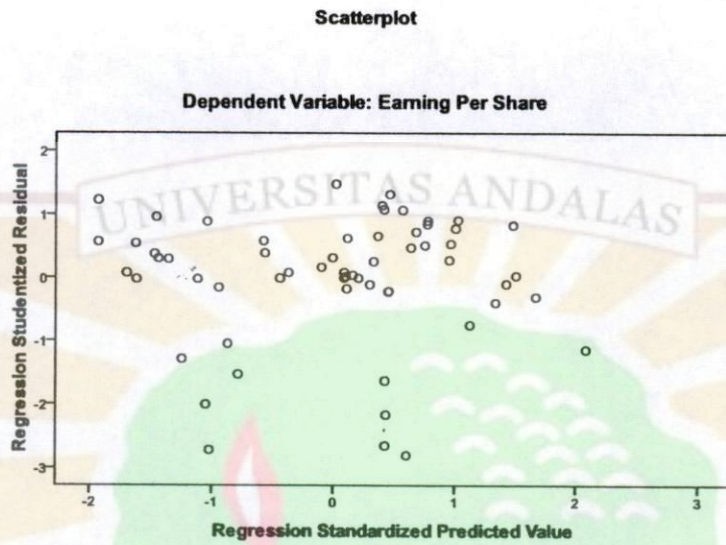
Sumber : Data diolah 2011

Dilihat dari Tabel 4.4 dapat kita lihat bahwa nilai VIF dari keempat variabel independen tidak ada yang melebihi angka 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi antar variabel independen masih bisa ditolerir.

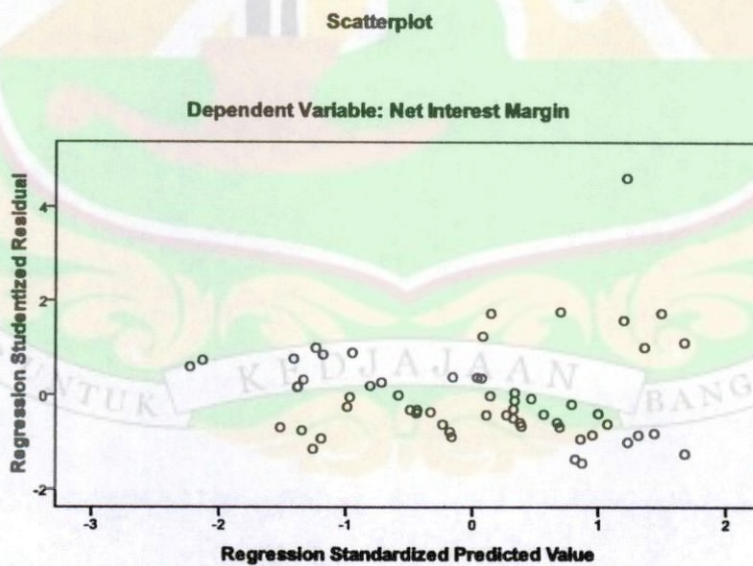
4.2.2.3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Grafik 4.3
Uji Heterokedastisitas Earning Per Share (EPS)



Grafik 4.4
Uji Heterokedastisitas Net Interest Margin (NIM)



Pada grafik 4.2 dan 4.3 di atas, tampak titik-titik menyebar di atas dan di bawah sumbu Y dan tidak terjadi pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

4.2.2.4 Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi biasanya terjadi apabila pengukuran variabel dilakukan dalam intereval waktu tertentu. Untuk menguji ada tidaknya Autokorelasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan Watson statistik, yaitu dengan melihat koefisien korelasi *Durbin Watson*.

Tabel 4.8
Uji Autokorelasi

	R	Durbin-Watson
EPS	.694 ^a	2.354
NIM	.463 ^a	2.040

Sumber : Data diolah 2011

Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa hasil pengujian autokorelasi pada variabel EPS menunjukkan nilai 2,354. Dengan merujuk pada kriteria Watson statistic, maka hasil uji autokorelasi EPS dinyatakan tanpa kesimpulan.

Sementara itu dapat dilihat juga bahwa hasil uji autokorelasi NIM menunjukkan nilai 2,040. Sesuai dengan kriteria uji autokorelasi Durbin-Watson, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar variabel dengan NIM sebagai variabel independen.

4.2.3 Hasil Pengujian Hipotesis

4.2.3.1 Pengaruh Kinerja Dewan Komisaris dan *Corporate Governance* terhadap EPS

Pengaruh antara kinerja dewan komisaris dan *corporate governance* terhadap kinerja yang di-*proxy*-kan dengan EPS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Uji Regresi EPS

Model	Unstandardized Coefficients		t	Signifikan
	B	Std. Error		
1 (Constant)	-5.716	1.644	-3.478	.001
Board Composition	-.012	.062	-.201	.841
Board Remuneration	.323	.085	3.788	.000
Board Meeting	.013	.006	2.095	.041
Board Training	-.005	.161	-.033	.973

Sumber : Data diolah 2011

Dari tabel koefisien dapat disimpulkan bahwa, Board Composition tidak berpengaruh signifikan terhadap EPS (sig. value > 0,05). Sementara itu, Board Remuneration dan Board Meeting berpengaruh signifikan terhadap EPS (sig. value < 0,05). Sedangkan Board Training tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap EPS (sig. value > 0,05).

Model regresi yang digunakan untuk uji hipotesis yang pertama adalah sebagai berikut:

$$EPS = \alpha + \beta_1 (BC) + \beta_2 (BR) + \beta_3 (BM) + \beta_4 (BT) + \varepsilon$$

Keterangan:

EPS : Earning Per Share

BC : Komposisi Dewan Komisaris (Board Composition)

BR : Tingkat remunerasi Dewan Komisaris (Board Remuneration)

BM : Frekuensi rapat Dewan Komisaris (Board Meeting)

- BT : Pelatihan anggota Dewan Komisaris (Board Training)
- α : Konstanta
- β : Koefisien Regresi
- ε : Koefisien Error

Dari hasil pengujian di atas dapat disusun suatu persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$\text{EPS} = -5,716 - 0,012 \text{ BC} + 0,323 \text{ BR} + 0,013 \text{ BM} - 0,005 \text{ BT} + \varepsilon$$

- a. Koefisien konstanta berdasarkan hasil uji regresi adalah 5,716 dengan nilai negatif, maka dapat diartikan bahwa EPS akan bernilai -5,716 apabila seluruh variabel independen (Board Composition, Board Remuneration, Board Meeting, dan Board Training) bernilai 0.
- b. Koefisien regresi Board Composition berdasarkan hasil uji regresi sebesar 0,12 dengan nilai negatif berarti setiap kenaikan Board Composition sebesar 1 maka akan menurunkan EPS sebesar 0,12.
- c. Koefisien regresi 0,323 untuk variabel Board Remuneration dapat diartikan bahwa setiap kenaikan Board Remuneration sebesar 1 maka akan menaikkan EPS sebesar 0,323.
- d. Koefisien regresi Board Meeting berdasarkan uji regresi sebesar 0,013 dapat diartikan bahwa setiap kenaikan Board Meeting sebesar 1 akan menaikkan EPS sebesar 0,013.
- e. Koefisien regresi Board Training berdasarkan uji regresi sebesar 0,005 dengan nilai negatif dapat diartikan bahwa perusahaan dengan kegiatan

pelatihan anggota dewan komisaris memiliki EPS lebih rendah sebesar 0,005 daripada perusahaan yang tidak memiliki kegiatan pelatihan anggota dewan komisaris.

4.2.3.2 Pengaruh Kinerja Dewan Komisaris dan *Corporate Governance* terhadap NIM

Pengaruh kinerja dewan komisaris dan *corporate governance* terhadap kinerja bank yang di-*proxy*-kan dengan NIM dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10
Uji Regresi NIM

Model		Unstandardized Coefficients		t	Signifikan
		B	Std. Error		
1	(Constant)	-5.336	6.847	-.779	.439
	Board Composition	.410	.259	1.585	.119
	Board Remuneration	.421	.356	1.184	.241
	Board Meeting	.008	.025	.339	.736
	Board Training	-1.229	.673	-1.828	.073

Sumber : Data diolah 2011

Dari tabel koefisien dapat disimpulkan bahwa, Board Composition, Board Remuneration, Board Meeting, dan Board Training tidak berpengaruh signifikan terhadap NIM (Sig. value > 0,05).

Persamaan regresi yang digunakan untuk uji hipotesis yang kedua adalah sebagai berikut:

$$\text{NIM} = \alpha + \beta_1 (\text{BC}) + \beta_2 (\text{BR}) + \beta_3 (\text{BM}) + \beta_4 (\text{BT}) + \varepsilon$$

Keterangan:

NIM : Net Interest Margin

BC	: Komposisi Dewan Komisaris (Board Composition)
BR	: Tingkat remunerasi Dewan Komisaris (Board Remuneration)
BM	: Frekuensi rapat Dewan Komisaris (Board Meeting)
BT	: Pelatihan anggota Dewan Komisaris (Board Training)
α	: Konstanta
β	: Koefisien Regresi
ε	: Koefisien Error

Dari hasil pengujian di atas dapat disusun suatu persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$\text{NIM} = -5,336 + 0,410 \text{ BC} + 0,421 \text{ BR} + 0,008 \text{ BM} - 1,229 \text{ BT} + \varepsilon$$

- Koefisien konstanta berdasarkan hasil uji regresi adalah 5,336 dengan nilai negatif, maka dapat diartikan bahwa NIM akan bernilai -5,716 apabila seluruh variabel independen (Board Composition, Board Remuneration, Board Meeting, dan Board Training) bernilai 0.
- Koefisien regresi Board Composition berdasarkan hasil uji regresi sebesar 0,410 setiap kenaikan Board Composition sebesar 1 maka akan menurunkan NIM sebesar 0,410 persen.

- c. Koefisien regresi 0,421 untuk variabel Board Remuneration dapat diartikan bahwa setiap kenaikan Board Remuneration sebesar 1 maka akan menaikkan NIM sebesar 0,421 persen.
- d. Koefisien regresi Board Meeting berdasarkan uji regresi sebesar 0,008 dapat diartikan bahwa setiap kenaikan Board Meeting sebesar 1 akan menaikkan NIM sebesar 0,008 persen.
- e. Koefisien regresi Board Training berdasarkan uji regresi sebesar 1,229 dengan nilai negatif dapat diartikan bahwa perusahaan dengan kegiatan pelatihan anggota dewan komisaris memiliki NIM lebih rendah sebesar 1,229 persen daripada perusahaan yang tidak memiliki kegiatan pelatihan anggota dewan komisaris.

4.2.3.3 Hasil Uji F (F test)

Pengujian ini bertujuan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 4.11 dibawah ini merupakan hasil pengujian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Board Meeting*, *Board Composition*, *Board Remuneration*, dan *Board Training* secara bersama-sama terhadap EPS.

Tabel 4.11
Hasil Uji F EPS

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Signifikan
1	Regression	17.877	4	4.469	12.752	.000 ^a
	Residual	19.276	55	.350		
	Total	37.153	59			

Sumber : Data diolah 2011

Tabel ANOVA dapat digunakan untuk analisis secara umum. Dari tabel ANOVA diatas dapat disimpulkan bahwa Board Composition, Board Remuneration, Board Meeting, dan Board Training secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap EPS ($F = 12,752$; sig value $0.000 < 0.05$).

Pada tabel 4.12 dapat dilihat hasil Uji F untuk variabel NIM. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Board Meeting*, *Board Composition*, *Board Remuneration*, dan *Board Training* secara bersama-sama terhadap NIM.

Tabel 4.12
Hasil Uji F NIM

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Signifikan
1	Regression	91.217	4	22.804	3.749	.009 ^a
	Residual	334.558	55	6.083		
	Total	425.775	59			

Sumber : Data diolah 2011

Tabel ANOVA dapat digunakan untuk analisis secara umum. Dari tabel ANOVA diatas dapat disimpulkan bahwa Board Composition, Board Remuneration, Board Meeting, dan Board Training secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap NIM ($F = 3,749$; sig value $0.009 < 0.05$).

4.2.3.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.13
Koefisien Determinasi EPS

	R	R Square	Adjusted R Square
EPS	.694 ^a	.481	.443

Sumber : Data diolah 2011

Dari koefisien determinan ($Adj R^2$) dapat diketahui derajat ketepatan dari analisis regresi linier berganda menunjukkan besarnya variasi sumbangan seluruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Dari tabel 4.11 diatas terlihat Board Composition, Board Remuneration, Board Meeting, dan Board Training secara bersama-sama menjelaskan 44,3% dari variasi EPS (Adjusted R Square 0.481). Sedangkan sisanya 55,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Tabel 4.14
Koefisien Determinasi NIM

	R	R Square	Adjusted R Square
NIM	.463 ^a	.214	.157

Sumber : Data diolah 2011

Dari koefisien determinan ($Adjusted R^2$) dapat diketahui derajat ketepatan dari analisis regresi linier berganda menunjukkan besarnya variasi sumbangan seluruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Dari tabel 4.11 diatas terlihat Board Composition, Board Remuneration, Board Meeting, dan Board Training secara bersama-sama menjelaskan 15,7%

dari variasi NIM (*Adjusted R Square* 0.157). Sedangkan sisanya 84,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.2.3.5 Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 4.15
Hasil Uji Hipotesis

	Hipotesis	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil
H1	Adanya pengaruh positif frekuensi rapat dewan komisaris terhadap kinerja	Board Meeting	EPS	Positif (diterima)
			NIM	Tidak signifikan (ditolak)
H2	Adanya pengaruh positif komposisi dewan komisaris terhadap kinerja	Board Composition	EPS	Negatif (ditolak)
			NIM	Tidak signifikan (ditolak)
H3	Adanya pengaruh positif pelatihan komisaris terhadap kinerja	Board Training	EPS	Negatif (ditolak)
			NIM	Negatif (ditolak)
H4	Adanya pengaruh positif tingkat remunerasi dewan komisaris terhadap kinerja	Board Remuneration	EPS	Positif (diterima)
			NIM	Tidak signifikan (ditolak)

4.3 Interpretasi Hasil

4.3.1 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Kinerja

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap kinerja. Pada penelitian ini ditemukan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja yang diukur dengan EPS. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Drobetz *et. Al.* (2003) yang menemukan hasil bahwa praktek *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja yang diukur dengan *expected stok return*. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa *corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Hal yang berbeda ditemukan ketika hasil pengujian menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara frekuensi rapat dewan komisaris dengan kinerja yang diukur dengan NIM. Hal ini sejalan dengan hasil temuan Vafeas (1999) yang menemukan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Hasil ini dikarenakan dewan komisaris cenderung meningkatkan frekuensi rapat ketika perusahaan menghadapi krisis (Vafeas, 1999).

Meskipun demikian, pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa kasus tersebut adalah karena fakta bahwa dewan komisaris melakukan pertemuan lebih sering pada saat perusahaan sedang menghadapi masa sulit. Secara intuitif, dewan komisaris mengakui signifikansi dan efektivitas pertemuan mereka, sehingga mereka melakukan pertemuan lebih sering dalam rangka meningkatkan kinerja

perusahaan. Dengan demikian, hasil ini masih konsisten dengan prediksi teoritis *corporate governance*.

4.3.2 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Terhadap Kinerja

Dari hasil analisis data, untuk komposisi dewan komisaris selama 2007 – 2010 ditemukan pengaruh negatif terhadap EPS serta tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap NIM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak anggota dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja, bahkan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Rata – rata jumlah anggota dewan komisaris perusahaan sampel selama rentang 2007 – 2010 adalah sebanyak 6 orang. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Guest (2009) yang menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara komposisi dewan komisaris dan kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q dan *return* saham.

Lipton & Lorsh (1992) merekomendasikan jumlah anggota dewan komisaris sebanyak 8 atau 9 orang, dan batas jumlah anggota dewan komisaris ialah 10 orang agar dapat berjalan dengan efektif.

4.3.3 Pengaruh Pelatihan Anggota Dewan Komisaris Terhadap Kinerja

Dari hasil analisis data, untuk pelatihan anggota dewan komisaris selama tahun 2007 – 2010 ditemukan hubungan negatif terhadap EPS dan NIM. Hal ini sesuai dengan penelitian Amos, Spiller, Storey dan Wade (1997) yang tidak dapat

menemukan hubungan antara pendidikan serta pelatihan anggota dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.

Hubungan negatif antara pelatihan anggota dewan komisaris dan kinerja perusahaan dapat disebabkan karena kurangnya pengungkapan informasi mengenai kegiatan pelatihan bagi anggota dewan komisaris dalam laporan tahunan yang diterbitkan perusahaan.

4.3.4 Pengaruh Remunerasi Dewan Komisaris Terhadap Kinerja

Dari hasil analisis data, untuk jumlah remunerasi dewan komisaris selama tahun 2007 – 2010 ditemukan pengaruh positif terhadap EPS. Hal ini sejalan dengan temuan Crespi dan Gipert (1998) yang menemukan hubungan positif antara remunerasi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan setelah melakukan penelitian terhadap 113 perusahaan di Spanyol.

Hasil berbeda ditemukan ketika hasil analisis data menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara jumlah remunerasi dewan komisaris terhadap NIM. Hal ini sesuai dengan hasil temuan Bauer et al. (2003) yang menyimpulkan hubungan negatif antara praktek *corporate governance* dengan ROE dan NPM serta temuan Crespi dan Gispert (1998) yang menyatakan adanya hubungan negatif antara jumlah remunerasi dewan komisaris terhadap kinerja industri secara keseluruhan.

Ada beberapa alasan yang dapat menjelaskan tidak adanya pengaruh signifikan antara jumlah remunerasi terhadap kinerja perusahaan antara lain kompensasi bagi komisaris cenderung meningkat ketika pengawasan atas

perusahaan memburuk (Brick, Palon dan Wald, 2005). Hasil yang serupa ditemukan oleh Fernandes (2005) yaitu adanya keraguan atas sistem insentif dewan komisaris dan hubungannya dengan peranan dewan komisaris sebagai pengawas.

4.3.5 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris, Pelatihan Dewan Komisaris, dan Remunerasi Dewan Komisaris Secara Bersama-sama Terhadap Kinerja

Dari hasil analisis data, pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, pelatihan dewan komisaris, dan remunerasi dewan komisaris secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja yang diukur dengan EPS dan NIM.

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan frekuensi rapat dewan komisaris komposisi dewan komisaris, pelatihan dewan komisaris, dan remunerasi dewan komisaris secara bersama-sama mempengaruhi EPS secara signifikan. Dimana EPS merupakan rasio paling diandalkan oleh investor sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan kepemilikan (Madichah, 2005). Sehingga EPS mempengaruhi investor untuk memiliki atau melepas saham perusahaan. Hal ini menjelaskan mengapa pengaruh signifikan frekuensi rapat dewan komisaris komposisi dewan komisaris, pelatihan dewan komisaris, dan remunerasi dewan komisaris lebih terlihat ketika kinerja diukur dengan EPS.

Frekuensi rapat dewan komisaris komposisi dewan komisaris, pelatihan dewan komisaris, dan remunerasi dewan komisaris secara bersama-sama juga berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja yang diukur dengan NIM.

Hasil uji serentak (Uji F) diatas sesuai dengan teori bahwa *corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan nilai ekonomi jangka panjang bagi seluruh *stakeholder*-nya (Vishny, 1988).

Meskipun begitu, hasil pengujian serta analisis data menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, pelatihan dewan komisaris, dan remunerasi dewan komisaris secara bersama-sama mempengaruhi EPS sebesar 44,3% dan NIM hanya sebesar 15,7%. Dengan demikian faktor-faktor dari praktek dan karakteristik *corporate governance* tersebut belum mampu memprediksi kinerja perusahaan secara tepat.

BAB V

PENUTUP

Pada bagian ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari hasil analisis data pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

Secara sederhana Monks dan Minow (2001) mengungkapkan bahwa *corporate governance* merupakan hubungan antara berbagai partisipan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan, dimana partisipan utamanya adalah pemegang saham, pihak manajemen, dan direksi.

Konsep *corporate governance* pada bank lebih kompleks dan berbeda dari jenis perusahaan lain sehingga membutuhkan lebih banyak perhatian. Dalam Spong dan Sullivan (2007) dinyatakan kerangka *corporate governance* pada bank selain terdiri atas pemegang saham, manajer, dan dewan direksi juga dibawah oleh sistem pengawasan publik dan kebijakan pemerintah yang membuat *corporate governance* pada bank unik dari bentuk perusahaan lain. Bank harus memuaskan keinginan para pemegang saham disisi lain juga harus sesuai dengan tujuan publik.

Penelitian ini terfokus pada kinerja dewan komisaris dalam menjalankan praktik *corporate governance* dengan tujuan untuk melihat pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, pelatihan dewan komisaris,

dan remunerasi dewan komisaris terhadap kinerja perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2007 – 2010. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 15 bank yang listing di bursa Efek Indonesia selama periode 2007 – 2010.

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial, variabel kinerja dewan komisaris dan *corporate governance* terhadap kinerja bank yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan analisis regresi berganda, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap EPS.

Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Drobotz et al. (2003) yang melakukan penelitian terhadap 91 perusahaan yang listing di pasar modal Jerman dengan waktu pengamatan selama 50 bulan dan menemukan bahwa praktek *corporate governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja saham yang diukur dengan *expected stock return*.

2. Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap NIM.

Vafeas (1999), dalam penelitiannya menemukan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan kecenderungan dewan komisaris cenderung memperbanyak frekuensi rapat ketika perusahaan sedang berada dalam masa sulit.

3. Komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap EPS.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil temuan Larmou dan Vafeas (2009) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris yang lebih besar berpengaruh positif terhadap nilai pemegang saham.. Mak & Kusnadi (2002), dalam penelitiannya terhadap perusahaan

di Singapore dan Malaysia menemukan hubungan negatif antara ukuran dewan komisaris terhadap nilai perusahaan. Komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja dapat disebabkan tidak efektifnya kegiatan pengawasan yang menjadi tugas anggota dewan komisaris

4. Komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap NIM
Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Cristina, Atansiu & Mariana (2010) yang menyebutkan bahwa tidak ada hubungan antara ukuran dewan komisaris dengan *net interest margin*. NIM lebih menggambarkan kinerja dari manajemen atau pelaksana operasional perusahaan, sedangkan dewan komisaris hanya menjalankan fungsi pengawasan.
5. Pelatihan anggota dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap EPS
Hal ini sesuai dengan penelitian Amos, Spiller, Storey dan Wade (1997) yang tidak dapat menemukan hubungan antara pendidikan serta pelatihan anggota dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.
6. Pelatihan anggota dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap NIM
Hubungan negatif antara pelatihan anggota dewan komisaris dan kinerja perusahaan dapat disebabkan karena kurangnya pengungkapan informasi mengenai kegiatan pelatihan bagi anggota dewan komisaris dalam laporan tahunan yang diterbitkan perusahaan.
7. Jumlah remunerasi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap EPS.
Di beberapa perusahaan, besaran remunerasi bagi dewan komisaris tergantung dari EPS (*performance-based*). Oleh karena itu ada

kecenderungan semakin tinggi tingkat remunerasi dewan komisaris akan dibarengi oleh kenaikan EPS.

8. Jumlah remunerasi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap NIM.

Dari hasil penelitian diatas, jumlah remunerasi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap NIM. Ada beberapa hal yang menyebabkan jumlah remunerasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NIM antara lain, *gap* NIM yang rapat antara bank dengan tingkat remunerasi tinggi dan bank dengan tingkat remunerasi yang rendah.

9. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris, Pelatihan Dewan Komisaris, dan Remunerasi Dewan Komisaris Secara Bersama-sama Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja.

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan frekuensi rapat dewan komisaris komposisi dewan komisaris, pelatihan dewan komisaris, dan remunerasi dewan komisaris secara bersama-sama mempengaruhi EPS secara signifikan. Dapat dilihat dalam tabel 4.11 bahwa seluruh variabel dependen secara bersama-sama mempengaruhi EPS sebesar 44,3%.

Sedangkan untuk variabel dependen NIM, meskipun memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja bank, frekuensi rapat dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, pelatihan dewan komisaris, dan remunerasi dewan komisaris secara bersama-sama hanya dapat memprediksi sebesar 15,7% dari kinerja perusahaan.

5.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, diantaranya :

1. Kinerja dewan komisaris yang digunakan sebagai variabel independen hanya terbatas pada frekuensi rapat dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, jumlah remunerasi dewan komisaris, dan ada tidaknya pelatihan yang diikuti oleh anggota dewan komisaris saja. Kinerja dewan komisaris dan praktek *corporate governance* juga dapat dilihat dari ada tidaknya komite-komite dibawah kendali dewan komisaris, frekuensi rapat komite-komite dibawah kendali dewan komisaris, dan latar belakang pendidikan anggota dewan komisaris.
2. Tinggi rendahnya kinerja juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang belum dimasukkan dalam model.
3. Pada penelitian ini hanya menguji pengaruh kinerja dewan komisaris dan *corporate governance* terhadap kinerja. Kinerja dewan komisaris dan *corporate governance* dapat dihubungkan dengan faktor lain, selain kinerja.
4. Penelitian ini juga terbatas pada bank yang listing di BEI periode 2007-2010.
5. Jumlah sampel dalam penelitian masih relatif sedikit.

5.3 Saran

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk :

1. Variabel kinerja dewan komisaris dapat dipertajam dengan menyajikan atribut variabel dengan lebih spesifik seperti bukan hanya frekuensi rapat dewan komisaris saja tetapi juga tema dan mutu rapat dewan komisaris.
2. Memasukan komponen *corporate governance* lainnya yang tidak terbatas pada kinerja dewan komisaris dan *corporate governance*.
3. Menentukan hubungan variabel lainnya yang lebih menentukan tingkat kinerja perusahaan, seperti kompetensi bisnis, motivasi, komitmen dan profesionalisme manajerial sebagai independen variabel. Sementara frekuensi rapat dewan komisaris, tingkat remunerasi anggota dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, dan pelatihan anggota dewan komisaris dapat dijadikan sebagai variabel moderating.
4. Selain itu untuk lebih memperdalam informasi mengenai pengaruh kinerja dewan komisaris dan *corporate governance* terhadap kinerja perlu dilakukan suatu penelitian yang lebih komprehensif lagi dari segi jumlah maupun cakupan sampel untuk melihat apakah hasil penelitian akan tetap konsisten atautkah menunjukkan hasil yang berbeda, misalnya dengan menggunakan sampel selain bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. (1998). A Study Of Corporate Governance and Financing In Selected Developing Member Countries.
- Amos, Spiller, Storey, and Wade. (1997). The Impact of Board Director Education, Training And Development on The Performance of Middle Market Firms In The UK, *Working Paper No. 48*, April, 1997.
- Bauer, Rob, Nadja, G., and Roger. (2003). Empirical Evidence on Corporate Governance in Europe: The Effect on Stock Return, Firm Value and Performance, *Forthcoming in The Journal Of Asser Management*, Oktober, 2003.
- Belkhir, M. (2008). Board of Directors Size and Performance in the Banking Industry. *Journal of Managerial Finance Vol. 5, No. 1, 2009*.
- Darmawati, Khomsyiah dan Rika Gelar R, (2005), "Hubungan *Corporate Governance* dan Kinerja Perusahaan", *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Yogyakarta, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Vol 8, No. 1, Januari 2005.
- Drobetz, Wolfgang, Andreas, and Heinz, *Corporate Governance and Expected Stock Returns: Evidence From Germany, ECGI Finance Working Paper*, Februari, 2003.
- Eisendhardt, M. K. (1989). Agency Theory : An Assesment and Review. *Management Review*, 4(1), 57-74. (diunduh tanggal 1 Februari 2011).

- Forum for Good Corporate Governance Indonesia: <http://www.fcgi.or.id/cms.html>
- Guest, Paul M. (2009). *The Impact of Board Size on Firm Performance : Evidence From UK.*
- Gruszczyński, Marek, *Corporate Governance and Financial Performance of Companies in Poland, International Advances in Economic Research Vol. 12 No. 2, May, 2006.*
- Jandik, Thomas and Craig R. (2005). *The Evolution of Corporate Governance and Firm Performance in Emerging Market: The Case of Sellier and Bellot. ECGI Working Paper Series in Finance, September, 2005.*
- Kaen, Fred. R, *A Blueprint for Corporate Governance: Strategy, Accountability, and the Preservation of Shareholder Value, AMACOM, USA. 2003.*
- Kaihatu, T. S. (2006). *Good Corporate Governance Dan Penerapannya Di Indonesia. Journal of Economy Management. <www.petra.ac.id> (diunduh tanggal 27 Januari 2011)*
- Kiel, Geoffrey C. & Nicholson, Gavin C. (2003). *Board Composition and Corporate Performance: How The Australian Experience Informs Contrasting Theories Of Corporate Governance.*
- King, Robert G. And Levine, Ross (1993). *Finance and Growth : Schumpeter Might Be Right, Policy Research Working Paper Series, 1083, The World Bank.*
- Klapper, L. and Love, 2002. *Corporate Governance, Investor Protection and Performance in Emerging Markets. World Bank Working Paper.*
- Krishendi, D. A. (2010). *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Pemerintah Terhadap Kinerja Bank Yang*

Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2008. Padang: Universitas Andalas.

Larmou, S. & Vafeas, N. (2009). The relation between board size and firm performance in firms with a history of poor operating performance. *Journal of Management and Governance Vol. 14, No. 1, 61-85*.

Lukviarman, N. (2004). Etika Bisnis Tak Berjalan Di Indonesia: Ada Apa Dengan Corporate Governance?. *Jurnal Siasat Bisnis, No. 9, Vol. 2, halaman 139-156*.

Macey, Jonathan R. and O'Hara M. (2003). The Corporate Governance of Banks, *Economic Policy Review, Vol. 9, No. 1, April 2003*.

Mitton, T. (2001). A cross-firm analysis of the impact of corporate governance on the East Asian financial crisis. *Journal of Financial Economics*.

Monks, Robert A.G, dan Minow, N (2003). *Corporate Governance 3rd Edition*, Blackwell Publishing.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus Dan Pejabat Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Pranata, Yudha, 2007. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

- Sekaran, U. (2006). *Research Methods for Business Buku 1* (14th ed). Salemba Empat, Jakarta.
- Shaw, John. C. (2003). *Corporate Governance and Risk: A System Approach*, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey.
- Shleifer A., & Vishny R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance. *The Journal Of Finance Vol. LII No.2*, 737-783.
- Suryo P. (2007). *Good Corporate Governance dan Kinerja BUMN Di Indonesia: Aspek Audit Manajemen dan Pengendalian Intern Sebagai Variabel Eksogen Serta Tinjauannya Pada Jenis Perusahaan*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah.
- Tandelilin, Kaaro, & Mahadwarta, Supriyatna. (2007). *Corporate Governance, Risk Management, and Bank Performance*. Faculty of Economics, Gadjah Mada University.
- Tricker, B. (2009). *Corporate Governance – Principles, Policies, and Practices*. UK: Oxford University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseoran Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Vafeas, Nikos. (1999). Board Meeting Frequency and Firm Performance, *Journal of Financial Economics Volume 53, Issue 1, Pages 113-142*